

**NEGARA DAN RESOLUSI KONFLIK  
(STUDI TERHADAP KONFLIK BANGSAMORO DI MINDANAO  
FILIPINA SELATAN)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Ilmu Politik (SIP.) Jurusan Ilmu Politik

Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**RESKIYANTI**

**NIM. 30600110038**

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 16 September 2014

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S

Reskiyanti  
NIM. 30600110038

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya mampu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Semata, atas segala nikmat dan karunianya. Ketidakmampuan penulis untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup sendirian, menghasilkan kebergantungan yang utuh pada zat-Nya. Shalawat dan salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta mereka yang berjalan di atas *manhaj*-Nya.

Penyusunan skripsi yang berjudul “**Negara dan Resolusi Konflik (Studi terhadap Konflik Moro di Mindanao Filipina Selatan)**” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam proses pengerjaan hingga akhir penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang bersifat material ataupun spiritual. Ucapan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga ini penulis sampaikan kepada Allah SWT semata, hanya karena kasih sayang-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan, kemudian kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda penulis, almarhum Muh. Saing, lelaki terhebat dan bijaksana dalam hidup penulis. Beliau yang selalu menekankan untuk hidup dengan jujur,

berbagi kepada sesama, tempat berbagi cerita, dan beberapa patah kata lagi yang tidak akan mampu mewakilinya dalam skripsi, apalagi sekedar kata pengantar ini.

2. Mama aji (Ibu) penulis, Hj. Hasni, sosok yang selalu memperhatikan ibadah, kesehatan, makan, dan istirahat penulis, dan selalu berdoa selama masa studinya. Mama aji adalah sosok perempuan hebat, wonder women, telah mengasuh, menjaga, dan membesarkan penulis beserta kedua saudaranya selama belasan tahun tanpa keberadaan sosok ayah. Mama aji merupakan malaikat yang terlihat dan sosok pencerah rohani bagi penulis .
3. Kakak penulis, Anniswati dan Suprianto, yang telah menjadi teladan bagi penulis. Sosok kakak yang mengajarkan banyak hal, seperti halnya mendidik dan mengajarkan penulis arti kemandirian menjadi seorang perempuan sejak dini hingga sekarang.
4. Om penulis, Kayyang. S. Pd, merupakan orang tua kedua penulis, kunci motivator handal bagi kelanjutan pendidikan penulis. Semangat yang tiada henti selalu diberikan ketika penulis mengalami jatuh bangun dalam menjalani proses pencapaian studinya sejak berada dalam sekolah dasar, hingga terselesainya skripsi ini.
5. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H. T, MS. Beliau adalah sosok pribadi yang penuh karakter.

6. Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag., telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam berbagai kepengurusan.
7. Ketua Jurusan Ilmu Politik. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M. Si. Ketua jurusan yang idealis, sistematis, bijak, kritis, dan pendobrak sistem yang mantap.
8. Sekertaris Jurusan Ilmu Politik. Bunda Nur Aliyah Zainal, S. IP., MA., yang detail, terorganisir, berkarakter dan merupakan Ibu kedua penulis di kampus yang telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis sejak maba hingga sekarang.
9. Staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Makassar, terkhusus staf Ilmu Politik, Nurhayati, S. Th., ibu yang telah meluangkan waktunya secara khusus untuk membantu kami (Mahasiswa Ilmu Politik) setiap hari, setiap jam dalam menuntaskan persoalan akademik kami. Maaf bu, kalau sering menyusahkan dan mengurangi waktu istirahatnya.
10. Pembimbing skripsi, Dr. Syarifuddin Jurdi, M. Si dan Nur Aliyah Zainal, S. IP., MA yang telah membimbing dan mengarahkan penulis yang kadang malas, kadang menghilang, kadang rajin sejak semester VI hingga menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas segala kemudahan dan sistem konsultasi yang humanis, dan terarah. Hal ini memudahkan bagi penulis dengan karakter yang susah fokus ini.
11. Para Dosen yang telah mendidik dan membina penulis di Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, terkhusus Ustadz Kadir Saile, Ustadz Darussalam,

Pak Samsyul Asri. S. IP., M.Si, Ibunda Ismah Tita Ruslin, S. IP., M.Si., Bunda Anggy Angraeni, S. IP., M.Si. Terima kasih telah menanamkan dan membantu penulis untuk berorientasi akhirat dan hidup yang lebih baik.

12. Para guru yang telah mengajar penulis di SMA Neg. 1 Tellusiattinge khususnya Bapak Drs. Mubarak. M. Pd., selaku wali kelas penulis di kelas IPA yang berbasis RSBI, Pak Yusran, S. Pd., M. Pd., Suparman, S. Pd., Kepala Sekolah SMA Neg. 1 Tellusiattinge Drs. Samsu Alam, Kepala Sekolah SMP 1 Tellusiattinge Ibu Hj. Hafisah, Kepala Sekolah SD 70 Lamuru Bapak Baharuddin Saibe. Dan yang terakhir, Ibu Nuraman selaku kepala TK Mallussetasi Lamuru.
13. Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Bunda Rita Widyasari. S. Sos. MM., yang telah memberikan bantuan tunjangan pendidikan kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan strata satu hingga wisudah, dan Pemda Kukar Bidang Kesejahteraan Masyarakat terkhusus untuk Sopiyanasyah, SE., Dani Saputra, SH., Eries Susanto, SE., yang telah membantu dan memudahkan dalam proses verifikasi tunjangan pendidikan penulis.
14. Teman-teman penulis, sejak dari TK sampai kepada level perguruan tinggi yang senantiasa belajar bersama dengan penulis. Untuk saudara dan teman seperjuangan penulis Ilmu Politik Angkatan 2010, sahabat Eagle Star, saudara Asrama Putri Kukar Kal-Tim, saudara Asrama Putra Kal-Tim, teman-teman HPMK3T-Makassar , sahabat Posko V KKNP, rekan organisasi PIXEL UIN

Alauddin Makassar, rekan organisasi HMI. Terima kasih kawan, saudara, sahabat, rekan, kakak, dan adik.

15. Juga tidak lupa untuk seluruh pegawai yang bekerja di Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan politik dari bagian administrasi hingga penanggung jawab kebersihan, dan bagian keamanan. Terima kasih atas semua bantuannya dan cerita-cerita lepasnya saat penulis bosan di kampus. Pak Ambo, dan sejarannya yang telah datang paling pagi dan pulang paling sore, tanpa kalian akan sulit bagi kami beraktivitas dengan lancar.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas seluruh jasa-jasa mereka dengan pahala yang besar dari sisi-Nya.

Akhirnya, semoga hasil kerja ini juga bernilai amal ibadah serta bernilai dakwah tertulis yang diterima di sisi Allah *'azza wa jalla*.

*Amin Ya Rabal-'A lamin*



Makassar, 16 September 2014

Penulis

Reskiyanti

NIM. 30600110038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Pembatasan Studi .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	24
H. Garis-garis Besar Isi .....	26
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KONFLIK BANGSAMORO MINDANAO</b>	
<b>DI FILIPINA SELATAN.....</b>	<b>27</b>
A. Kelompok Etnik di Filipina.....	27
B. Dinamika Islam dan Moro di Mindanao .....	33
C. Kompleksitas Sejarah Konflik Mindanao .....	46



<b>BAB III</b>	<b>RELASI PEMERINTAH DENGAN BANGSAMORO DALAM</b>	
	<b>PENYELESAIAN KONFLIK MORO DI MINDANAO .....</b>	<b>53</b>
	A. Pemetaan Konflik Mindanao Filipina Selatan .....	53
	a. Konflik Agama.....	54
	b. Konflik Ekonomi.....	58
	c. Konflik Politik .....	61
	B. Respon Bangsamoro terhadap Pemerintah Filipina .....	64
	a. Sikap Bangsamoro .....	64
	b. Aktor-aktor yang Teribat dalam Konflik Bangsamoro ....	69
	C. Resolusi Konflik melalui Mediasi dan Negosiasi .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
	A. Kesimpulan .....	89
	B. Implikasi.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>		<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>98</b>

## ABSTRAK

**Nama : Reskiyanti**  
**NIM/Jurusan : 30600110038/Ilmu Politik**  
**Judul : Negara dan Resolusi Konflik**  
**(Studi Terhadap Konflik Bangsamoro Di Mindanao Filipina Selatan)**

---

Skripsi ini membahas tentang konflik Bangsamoro dengan pemerintah Filipina, relasi pemerintah dengan Bangsamoro, dan peran pihak ketiga sebagai mediasi dalam resolusi konflik Bangsamoro di Mindanao Filipina Selatan. Konflik Bangsamoro terjadi sejak masa kolonialisme Spanyol di Filipina dan terus berlangsung hingga saat ini.

Pada awal 1970-an, terjadi perlawanan antara pendatang Kristen Filipino bagian Utara Filipina dan penduduk asli masyarakat Bangsamoro di wilayah Mindanao bagian Selatan Filipina. Perlawanan tersebut berawal dari adanya perpindahan penduduk Kristen ke tempat tinggal orang-orang Islam di Mindanao. Dampak dari peristiwa tersebut banyak tanah-tanah milik orang Islam di Mindanao diduduki dan dimiliki secara paksa oleh pendatang Katolik, dan adanya berbagai kebijakan pemerintah Filipina tentang hak kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tuntutan Bangsamoro, dan berbagai macam kepentingan hadir dalam konflik tersebut. Inilah awal konflik Bangsamoro yang kemudian melahirkan organisasi-organisasi dari kelompok penduduk asli Muslim Bangsamoro di Mindanao seperti MIM, MNLF, MILF, dan lainnya. Organisasi-organisasi perlawanan di wilayah Mindanao Filipina memiliki tujuan untuk membebaskan masyarakat Bangsamoro dari pemerintah pusat Filipina dan membentuk Negara sendiri.

Skripsi ini memaparkan pemetaan konflik yang terjadi antara Bangsamoro, Kristen Filipino, dan pemerintah Filipina. Diantaranya konflik agama antara umat Islam Bangsamoro dengan Kristen Filipino yang disebabkan karena perebutan tanah antara kedua belah pihak dan undang-undang hak kepemilikan tanah yang tidak berpihak pada Muslim Bangsamoro. Konflik ekonomi yang ditandai dengan usaha pemerintah Filipina untuk mengeksploitasi hasil tambang atau sumber daya alam lainnya di wilayah Mindanao. Banyak usaha dari pemerintah Filipina untuk mengeksploitasi hasil tambang ini untuk keuntungan berbagai proyek industri tambang ini di Utara Filipina, kemudian konflik politik hingga lahirnya konflik bersenjata.

Relasi antara Bangsamoro dengan pemerintah Filipina cenderung tidak harmonis, hal ini ditandai dengan berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi perlawanan Bangsamoro atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai tuntutan.

Berbagai macam bentuk resolusi konflik dan keikutsertaan pihak ketiga dalam memediasi konflik telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Bangsamoro, seperti halnya *Tripoli Agreement*, *Final Peace Agreement*, dan kesepakatan lainnya yang dimediasi oleh Libya, Indonesia, dan Negara Islam lainnya. Meskipun telah dilakukan banyak cara dalam penyelesaian konflik Bangsamoro dengan pemerintah Filipina, namun kesepakatan tersebut tetap dilanggar dan konflik masih tetap terjadi hingga sekarang.

Dan penulis berkesimpulan bahwa konflik antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina akan terus berlangsung dan tidak akan menemukan titik akhir walaupun dengan berbagai macam strategi dan kesepakatan yang dilakukan untuk meredam konflik, karena kedua belah pihak akan terus tetap bersikukuh pada ideologi mereka masing-masing

Kata Kunci: Konflik, Bangsamoro, Pemerintah Filipina, Resolusi konflik

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konflik Mindanao merupakan konflik yang sangat tua dan klasik, yang melibatkan penduduk Mindanao dengan penduduk di luar Mindanao. Dinamika konflik Mindanao berawal dari perlawanan penduduk Mindanao terhadap upaya kolonisasi oleh Spanyol yang telah berhasil menguasai Kepulauan Luzon dan hendak meluaskan wilayah pengaruhnya ke bagian selatan Luzon di abad ke-15 M.

Pada periode berikutnya, konflik Mindanao kembali menunjukkan momentum yang dinamis ketika transisi rezim kolonial Spanyol ke Amerika Serikat menjelang Perang Dunia ke-II. Pada periode awal kolonisasi Amerika Serikat di Filipina pada 1898, sikap etnis Mindanao terhadap Amerika Serikat berbeda dengan rezim Spanyol, dengan menunjukkan sikap yang bersahabat dan kooperatif.<sup>1</sup> Amerika Serikat cenderung tidak mempersoalkan identitas Islam sebagai identitas kultural yang harus diganti dengan identitas yang baru, sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Spanyol.

Hubungan antara masyarakat Islam Mindanao dan Amerika Serikat menunjukkan pola konfliktual saat Amerika Serikat melakukan kebijakan yang dikenal dengan Bacon Bill. Bacon Bill merupakan kebijakan untuk mempersiapkan Negara baru di Filipina dengan menggabungkan masyarakat di Utara (kepulauan

---

<sup>1</sup>Bahkan, sikap kooperatif ini ditunjukkan dengan kerelaan oleh kesultanan Mindanao untuk dimasukkan dalam wilayah otoritas Amerika Serikat di Asia Tenggara. Lihat opsi kooperatif ini dalam Caser Adib Majul, *Dinamika Islam Philipina*, (Jakarta: LP3ES, 1996). Hal. 14

Luzon) dan masyarakat di Selatan (Kepulauan Mindanao) dengan pusat pemerintahan di Luzon. Para *Datus* di Mindanao melakukan protes keras terhadap Bacon Bill dengan mengirim petisi agar Bacon Bill tersebut dibatalkan, dan wilayah Mindanao menjadi protektorat Amerika Serikat sampai masyarakat Mindanao telah siap menjadi Negara merdeka. Namun, pemerintah terus melanjutkan program Bacon Bill di mana kemudian wilayah Mindanao menjadi wilayah administratif dan politik dari Filipina.

Pasca kemerdekaan Filipina, 4 Juli 1946, konflik Mindanao terjadi antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao. Kebijakan pemerintah Filipina Manuel Quezon yang hendak menghapuskan struktur budaya, hukum dan politik serta diganti dengan struktur hukum, serta budaya dan politik yang berbasis hukum positif di Filipina. Pilihan kebijakan Manuel Quezon ini mendapatkan perlawanan keras dari para *Datus* di Mindanao karena dipahami akan mengancam legitimasi para *datus* maupun mengancam identitas Islam yang sudah berakar di Mindanao semenjak abad ke 15.<sup>2</sup>

Periode paling krusial konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao adalah pada masa presiden Marcos antara tahun 1968-1972. Dalam periode ini, respon pemerintah Filipina terhadap keinginan masyarakat Mindanao untuk melakukan pemisahan diri, cenderung menggunakan pendekatan represif. Beragam penyiksaan, pembunuhan, ataupun mengirim pasukan sipil, dalam hal ini etnis Ilaga

---

<sup>2</sup> Cesar Adib Majul, *Dinamika Islam Philipina*, (Jakarta: LP3ES, 1987). Hal. 18-20.

untuk membantai masyarakat Mindanao cenderung menjadi kebijakan pokok dengan diberlakukannya *Martial Law*.<sup>3</sup>

Dalam upaya mempertahankan wilayah, rezim di Filipina memiliki dua strategi besar, yakni dengan strategi konfrontasi terhadap kelompok pemberontak maupun melakukan strategi politik berupa perjanjian damai ataupun referendum untuk penentuan pilihan politik masyarakat Mindanao.

Rezim Marcos yang berkuasa semenjak 1970 cenderung menerapkan kebijakan represif kepada setiap bentuk perlawanan masyarakat Mindanao kepada pemerintah, baik yang dilakukan oleh kelompok Mindanao muslim ataupun kelompok komunis. Kebijakan represif ini tercerminkan dalam kebijakan *Martial Law*, sebuah kebijakan yang memberikan ruang yang besar bagi tentara Filipina dan penduduk Katolik melakukan tindakan kekerasan kepada komunitas muslim. Meskipun demikian, pada akhirnya rezim Marcos pada 1976 juga mulai menunjukkan sikap akomodatifnya terhadap gerakan perlawanan Bangsamoro. Sikap akomodatif rezim Marcos tidak bisa dilepaskan dari tekanan masyarakat internasional dan dunia Islam terhadap kebijakan represifnya.

Rezim Aquino yang menggantikan rezim Marcos di 1992 cenderung mengembangkan kebijakan akomodatif terhadap kelompok perlawanan Mindanao daripada kebijakan represif. Pilihan kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari spektrum politik di Filipina dan dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik

---

<sup>3</sup> Lihat lebih jauh dalam Cesar Adib Majul, *Muslim in the Philippines*, edisi ke-2, Quezon city, University of the Philippines Press, 1973.

Mindanao di meja perundingan. Langkah- langkah yang dilakukan Aquino adalah dengan melakukan pertemuan informal dan formal dengan elite-elite MNLF dan beberapa Negara Timur Tengah sebagai fasilitator negoisasi.<sup>4</sup>

Rezim Fidel Ramos sebagai penerus rezim Aquino cenderung untuk meneruskan gaya kepemimpinan Aquino untuk bersikap akomodatif terhadap kelompok perlawanan di Mindanao. Sebagai mantan wakil presiden pada rezim Aquino, Ramos telah merintis jalan perdamaian dengan kelompok perlawanan. Sikap *pro peace* rezim Ramos, membuat MNLF yang sebelumnya memilih sikap konfrontatif pasca Tripologi Agreement 1976, mulai menunjukkan sikap akomodatif dan menerima tawaran negoisasi dalam konteks *Final Peace Agreement* 1996.

Berbeda dengan rezim Aquino dan Ramos yang cenderung mengembangkan kebijakan akomodatif atau *all – out peace* terhadap kelompok perlawanan Bangsamoro, rezim Estrada cenderung memilih kebijakan represif (*all – out wars*). Kebijakan Estrada keras ia melakukan penyerangan langsung dan menghancurkan *camp – camp* serta markas MILF, Abu Sayyaf dan MNLF yang dianggap sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas. Sikap represif Estrada cenderung juga dilanjutkan oleh Arroyo dalam menyelesaikan konflik Mindanao, untuk mendukung kebijakan tersebut rezim Arroyo mengembangkan kembali kebijakan kerjasama

---

<sup>4</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal.

militer dengan Amerika Serikat terutama kerjasama perang terhadap jaringan terorisme internasional.

Peristiwa yang paling meninggalkan trauma dan kebencian masyarakat Mindanao terhadap kebijakan pemerintah Filipina adalah tragedi Jabidah. Dalam tragedi ini, pemerintah Filipina membunuh sejumlah 60 orang Mindanao, yang kesemuanya adalah muslim yang direkrut oleh pemerintah Filipina untuk melakukan infiltrasi ke Sabah. Setelah mengetahui misi dari perekrutan ini untuk menyerang Sabah, maka semua yang direkrut melakukan penolakan. Pemerintah Marcos menganggap penolakan ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat Mindanao terhadap kekuasaan pemerintah Filipina.<sup>5</sup>

Respons terhadap tragedi Jabidah dan pemberlakuan *Martial Law* yang semakin memarginalkan masyarakat Mindanao pada awalnya cenderung disikapi oleh para elite tua (Sultan di Mindanao) dengan cara-cara kultural dan ekonomi. Dalam pandangan para Sultan Mindanao peristiwa ini tidak lepas dari persoalan miskomunikasi ataupun salah pengertian akibat perbedaan budaya. Namun, analisis dari Samuel Tan maupun Patricio Abinales, maupun Majul, respons akomodatif ini disinyalir sebagai akibat pemberian konsesi ekonomi, budaya dan politik pemerintah Filipina terhadap para sultan di Mindanao.

---

<sup>5</sup> Lihat lebih jauh peristiwa Jabidah ini dalam *ibid.*, atau dalam Eric Gutierrez dan Saturnino Bortas, Jr, "The Moro Conflict: Landlessness and Misdirected State Policies", *Policy Studies* 8, East-West Center. Washington, 2004.

Konflik Mindanao telah menempatkan etnis Islam menjadi korban utama dari kebijakan pemerintah Filipina. Konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao kemudian menjadi konflik bersenjata (*armed conflict*).

Internasionalisasi konflik di Mindanao oleh MNLF menghasilkan respon serius dari masyarakat internasional, khususnya dari Dunia Islam. Beberapa Negara yang kemudian secara intensif dalam melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah Filipina dan kelompok perlawanan MNLF adalah Libya, Arab Saudi dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Mindanao. Di tingkat Organisasi Internasional, OKI merupakan organisasi memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memediasi penyelesaian konflik, dari proses menyiapkan perjanjian dan implementasi perjanjian di bandingkan Amerika Serikat, ASEAN dan PBB.<sup>6</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pemetaan konflik Bangsamoro di Mindanao Filipina Selatan?
2. Bagaimanakah relasi pemerintah dengan Bangsamoro dalam penyelesaian konflik di Mindanao Filipina Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan pokok masalah yang disebutkan, maka tujuan dan kegunaan penulisan ini dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Tujuan

---

<sup>6</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal. 5



- a. Untuk mengetahui pola pemetaan konflik Bangsamoro di Mindanao Filipina Selatan.
  - b. Untuk mengetahui relasi pemerintah dengan Bangsamoro dalam penyelesaian konflik di Mindanao Filipina Selatan.
2. Kegunaan
- a. Kegunaan praktis tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) terkhusus di bidang ilmu politik.
  - b. Kegunaan akademis. Sebagai akademisi, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan rujukan pembanding atas tema-tema serupa yang telah hadir sebelumnya. Keberagaman sudut pandang diharapkan dapat membentuk cakrawala berfikir yang netral dan independen.

#### **D. Pembatasan Studi**

Sebelum melangkah lebih jauh, agar pembahasan skripsi ini tidak mengalami pelebaran dan tetap fokus pada permasalahan yang akan diungkap, tentunya penulis akan memberikan batasan terhadap studi ini antara periode 1970 sampai dengan tahun 2013, hal ini dikarenakan pada dekade 1970-an merupakan fase awal dimana Bangsamoro melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan Bangsamoro dan pada dekade tersebut juga untuk yang pertama kalinya pemerintah Filipina melakukan perundingan dengan para pemimpin gerakan MNLF yang dipelopori oleh Nur Misuari dan Hasim Salamat.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang penelusuran penulis mengenai judul ini, memang telah banyak yang telah melakukan penelitian mengenai konflik Bangsamoro di Mindanao Filipina Selatan namun dengan mengambil masalah yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda-beda pula.

Seperti halnya buku yang berjudul ***Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Negoisasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao***, karya Surwandono. Buku ini hanya membahas sejarah, politik Mindanao sebelum dan pasca masuknya Islam, berbagai proses negoisasi yang dipaparkan, serta pemaparan lain yang terkesan kurang sederhana memaparkan pemetaan konflik Mindanao, buku ini juga tidak menunjukkan bagaimana peran atau keberadaan Negara dalam proses penyelesaian konflik Mindanao tersebut.

***Dinamika Islam Filipina***, karya Cesar A. Majul. Buku ini membahas tentang identitas dari kelompok – kelompok Islam masyarakat Muslim Bangsamoro yang berada di tengah – tengah orang non Muslim. Buku ini juga membahas suatu permasalahan yang tidak hanya muncul dari pihak kuasa saja, akan tetapi juga dari golongan penentang Muslim yang selalu dirugikan prinsip – prinsip pemerintah ditetapkan di Negara Filipina, terutama di Filipina Selatan.<sup>7</sup>

***Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal***, karya Syahbuddin Mangandaran, buku ini membahas sejarah singkat, sistem pemerintahan yang

---

<sup>7</sup> Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainnury (Jakarta: LP3ES, 1989).

diterapkan, perkembangan perekonomian di Negara Filipina dan Bangsamoro berjuang untuk sebuah Negara sendiri.<sup>8</sup>

**The Secret of Jihad Moro: Fakta – Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Muslim Moro, karya Abu Ibrahim Muhammad Daud.** Buku ini membahas perjuangan Bangsamoro melawan para penjajah dan menceritakan dengan gamblang tentang kamp Abu Bakar Ash – Shiddiq beserta istrinya. Buku ini juga membahas pemimpin dari gerakan MILF yang memisahkan diri dari gerakan MNLF dan mengungkap kisah – kisah pemimpin Bangsamoro yang telah meninggal.<sup>9</sup>

Tulisan ini sendiri hadir untuk menyajikan pola pemetaan konflik Bangsamoro, perihal relasi pemerintah dengan Bangsamoro dalam penyelesaian konflik di Mindanao Filipina Selatan. Sebuah kajian sederhana, lugas, dan spesifik serta diharapkan dapat menjadi tulisan yang baik dibaca.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Negara**

Negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik. Negara merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat,<sup>10</sup> Negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan

---

<sup>8</sup> Syahbuddin Mangndaralam, *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)

<sup>9</sup> Abu Ibrahim Muhammad Daud, *The Secret of Jihad Moro : Fakta – Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Moro* (Solo: Media ISLAMIKA, 2008).

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2008). Hal. 47

atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri. Dengan demikian Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa Negara mempunyai dua tugas:

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan Negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.<sup>11</sup>

Terdapat beragam defenisi Negara menurut para ahli, seperti halnya *Thomas Hobbes* yang mengatakan Negara merupakan suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak berama-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya sebagai alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2008). Hal. 48

Adapula pandangan Plato, mengatakan bahwa Negara suatu tubuh yang senantiasa tampak maju, berkembang, sebagaimana layaknya orang-orang (manusia).

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pada pembahasan tentang teori Negara dalam penulisan ini, penulis akan memasukkan teori strukturasi yang juga memiliki keterkaitan tentang sebuah Negara. Teori strukturasi memiliki dua poin penting yang perlu dibahas, yaitu tentang agen dan struktur.

a. Agen.

Model stratifikasi agen yaitu *monitoring refleksif* atas tindakan yang merupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya perilaku si individu, namun juga perilaku dari individu-individu lain. Maksudnya, para aktor tidak hanya memonitor secara terus-menerus arus aktivitas mereka dan berharap orang lain melakukan hal yang sama terhadap aktivitas mereka sendiri, para aktor itu juga secara rutin memonitor aspek-aspek, baik sosial maupun fisik, dari konteks-konteks tempat di mana mereka bergerak.

Selain *monitoring refleksif* terhadap tindakan, adapula rasionalisasi tindakan. Yang dimaksudkan dengan rasionalisasi tindakan adalah bahwa para aktor juga secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan mempertahankan suatu pemahaman teoritis yang terus-menerus tentang landasan-landasan aktivitas mereka. Memiliki pemahaman seperti itu tidak boleh disamakan dengan

pengungkapan alasan-alasan bagi unsur-unsur tindakan tertentu, tidak juga dengan kemampuan menspesifikasi alasan-alasan itu secara diskursif. Namun demikian, harapan para agen kompeten tindakan-tindakan yang lain dan inilah kriteria kompetensi yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari adalah bahwa para aktor biasanya akan mampu menjelaskan sebagian besar tindakan mereka, jika memang diminta.<sup>12</sup>

#### b. Struktur

Struktur di sini tampil sebagai sesuatu yang berada di luar tindakan manusia, sebagai sumber pengekan inisiatif bebas subjek yang mandiri. Di sini, struktur secara khas dipahami bukan sebagai penciptaan pola terhadap kehadiran-kehadiran, melainkan sebagai persinggungan antara kehadiran dan ketidakhadiran kode-kode pokok harus diperoleh dari penampakan-penampakan luar.

Struktur merupakan aturan dan sumber daya, atau seperangkat relasi transformasi terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial. Sedangkan sistem itu sendiri merupakan relasi-relasi yang reproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial regular.

## 2. Konflik

Sebelum masuk ke teori konflik, akan dipaparkan pengertian tentang konflik. Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu “*con*” yang artinya bersama, dan “*fligere*” yang artinya benturan atau tabrakan. Dengan demikian, arti dari konflik dalam kehidupan sosial yaitu benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain –

---

<sup>12</sup> Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 7-8

lain yang melibatkan dua pihak atau lebih. Secara sederhana konflik dapat diartikan sebagai suatu perselisihan atau suatu persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu ataupun secara kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan.<sup>13</sup>

Selain itu, penulis juga menggunakan teorinya *Michael Brown* tentang *Nationalism and Ethnic Conflict*. Menurutny, terdapat 2 faktor akibat terjadinya konflik yaitu faktor struktural dan faktor politik.<sup>14</sup> Faktor struktural menekankan pada *weak state* (lemahnya Negara), keamanan dalam negeri dan etnisitas suatu wilayah. Apabila dihubungkan dengan konflik Filipina yaitu etnisitas (kesukuan) yang bertempat di wilayah Mindanao yaitu penduduk asli yang mempunyai budaya ketimuran. Sedangkan Filipina bagian Utara membawa budaya Barat. Faktor politik bisa dilihat dari pemicu ketegangan antar etnis. Ketegangan etnis berkaitan dengan sistem politik, ideologi politik yang berlaku, dinamika politik antar kelompok dan perilaku elite. Apabila dihubungkan dengan Filipina Selatan, yaitu masyarakat Muslim Bangsamoro sering melakukan pemberontakan karena kalangan elite tidak memihak kepada kepentingan masyarakat Muslim Bangsamoro buktinya muncul gerakan-gerakan radikal seperti MIM, MNLF, MILF, dan kelompok Abu Sayaf.

---

<sup>13</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 347 – 348.

<sup>14</sup> Nasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). Hal. 41

Sebelum penulis mengkaji lebih dalam tentang jenis konflik yang terjadi di Mindano Filipina Selatan, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai berbagai macam analisis konflik.

Salah satu bentuk analisis konflik yaitu pemetaan konflik. Pemetaan konflik memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya.<sup>15</sup>

Salah satu model pemetaan konflik yang dikembangkan oleh sosiolog dari *United Nations-University for Peace*, Amr Abdalla, yaitu model SIPABIO<sup>16</sup>. SIPABIO adalah:

- a) *Source* (sumber konflik). Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik berbeda. Jika kita kembali pada analisis sosiologi konflik, berbagai sumber konflik tersebut bisa muncul dari model hubungan sosial, nilai-nilai seperti identitas dan agama, dan dominasi struktural.
- b) *Issues* (isu-isu). Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik.
- c) *Parties* (pihak). Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan

---

<sup>15</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2009). Hal. 95

<sup>16</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Hal. 98



kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik.

- d) *Attitudes/feelings* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang memengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif dan negatif bagi konflik.
- e) *Behavior* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*.
- f) *Intervention* (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditunjukkan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian.
- g) *Outcome* (hasil akhir). Outcome adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi.<sup>17</sup>

Terdapat dua jenis konflik, pertama dimensi vertikal atau konflik dalam hal ini merupakan konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elite di sini para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakannya instrument kekerasan Negara, sehingga timbul korban di kalangan massa (rakyat). Kedua, konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri.

---

<sup>17</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Hal. 99

Tanpa konflik, menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.

Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.<sup>18</sup>

Dalam menganalisa konflik Moro, penulis menggunakan pemetaan konflik SIPABIO<sup>19</sup>. Jenis analisa seperti ini digunakan sebagai bagian suatu analisis untuk memahami berbagai dinamika situasi suatu konflik, dan persiapan untuk melancarkan dialog di antara kelompok-kelompok dalam situasi konflik, sebagai bagian dari proses mediasi atau negoisasi.<sup>20</sup>

### **3. Resolusi Konflik**

Resolusi konflik menangani sebab – sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok – kelompok yang bermusuhan.

---

<sup>18</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Hal. 100

<sup>19</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Hal. 98

<sup>20</sup> Fisher, Simon, dkk. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: British Council, 2000). Hal. 27

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10:

يَتْلُوا الْآحْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَىٰهُمَا بَعَثَ فِيهِمَا فَاصِّحُوا أَوْ اقْتُلُوا الْمُؤْمِنِينَ مَن طَآءَفَتَانِ وَإِن  
مُّحِبُّ اللَّهِ إِنَّهُ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِّحُوا أَوْ آتَاكَ اللَّهُ أَمْرًا إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَقَدِ  
تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِّحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُقْسَطِينَ

Terjemahannya:

*“9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

*10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*

Dalam ayat tersebut dapat dilihat adanya perintah Allah SWT untuk mendamaikan orang-orang yang sedang terlibat konflik.

Fisher menjelaskan resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka. Titik tekan dari resolusi konflik berusaha menangani sebab-sebab konflik dan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Resolusi pada dasarnya adalah setiap upaya intervensi (untuk mencegah aktualisasi, mende eskalasi, menghentikan dan menyelesaikan konflik) dalam salah

satu atau lebih tahap konflik. Salah satu sumber konflik yang terjadi antara satu pihak dengan yang lainnya adalah kondisi-kondisi laten dan aktual yang memproduksi keyakinan atau kepercayaan tentang adanya tujuan-tujuan yang tak selaras konstruktivistik atau asumsi dasar tentang sifat manusia dan proses sosial internal dan intersaksional. Dengan kata lain kemunculan konflik disebabkan karena terdapat rasa atau kesadaran kolektif, ketidakpuasan kolektif terhadap pihak atau pihak-pihak lain dan tujuan-tujuan yang saling berlawanan.

Menguatnya konflik seringkali dipicu oleh provokasi para pihak yang terlibat. Provokasi bisa berupa persuasi, koersi dan balas jasa atau iming-iming baik material maupun non-material, bahkan bisa juga provokasi berupa gabungan dari ketiganya. Kehadiran pemicu konflik diatas pada perjalanannya turut pula meningkatkan eskalasi konflik yang ditandai dengan perubahan dalam unit konflik : sosio-psikologis (loyalitas dan komitmen pada tujuan/posisi yang telah ditetapkan, *sense of crisis* terhadapnya dan organisasional (komposisi kelompok, kompetisi dalam kepemimpinan) dan diwarnai dengan perubahan dalam hubungan-hubungan antar pihak yang bertikai (aksi sepihak atau bersama-sama yang saling menyakiti). Sementara itu, untuk menyelesaikan konflik, secara teoretis ada banyak sekali model, namun dalam tulisan ini disajikan suatu model yang dianggap paling relevan dengan topik bahasan. Model itu adalah model intervensi pihak ketiga dalam bentuk mediasi dan negosiasi. Secara paling sederhana, pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang

berada di luar konflik anataradua pihak atau lebih dan mencoba membantu mereka untuk mencapai kesepakatan.

Dalam model ini ada beberapa bentuk, namun penulis hanya mengambil salah satu diantara beberapa model tersebut yaitu mediasi. Mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Mediasi adalah sebuah tindakan intervensi pihak luar untuk menyelesaikan konflik bersama. Mediasi bekerja untuk menciptakan proses perdamaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui dialog politik yang konstruktif, atau untuk mengubah proses dialog menjadi sebuah resolusi konflik dan pembuatan perdamaian.

Dalam definisi ini, ada sejumlah elemen yang terlibat dalam tindakan mediasi. Diantaranya adalah mediasi merupakan tindakan orang luar (netralitas). Mediator membantu musuh untuk menyelesaikan konflik (fasilitasi). Mediasi adalah komponen dari proses resolusi konflik dan perdamaian. Melalui mediasi, pihak terlibat dalam dialog konstruktif (kompromi).

Adapun peran mediator yang paling utama dalam proses mediasi adalah mengontrol proses komunikasi dan memikirkan serta menyarankan ide baru untuk perjanjian dengan argumen yang jelas serta berbagai pilihan tertentu. Dengan kata lain mediator adalah medium dimana kedua belah pihak dapat memulai berkomunikasi. Dimana peran mediator disini adalah berupaya untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998). Hal. 241.

mengkondisikan proses komunikasi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu dalam proses mediasi, mediator juga dapat berkonsultasi dengan kedua belah pihak atau pihak yang berkonflik, memastikan kekhawatiran masing-masing dan kemudian membantu kedua belah pihak untuk menghindari perbedaan pendapat dalam persiapan untuk negosiasi.

Ketika perbedaan pendapat muncul, mediator dapat mengajukan solusi atau alternatif. Selanjutnya, mediator dapat membantu para pihak untuk merumuskan penyelesaian konflik yang solutif dan inovatif. Hal ini pun merupakan bukan tugas yang mudah. Karena bagaimanapun juga sebuah proses perdamaian harus saling diterima oleh para pihak. Para pihak yang terlibat dalam konflik harus merasa puas dan nyaman dengan hasilnya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa peran mediator adalah untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang berfungsi sebagai wasit, pemikir netral dan perencana konstruktif.

Kemudian untuk mendukung tingkat efektifitas peran pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah konflik dapat melakukan intervensi dengan melakukan modifikasi struktur fisik dan sosial, mengubah struktur isu dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi pihak-pihak yang berkonflik.

Memodifikasi struktur fisik dan sosial maksudnya adalah bahwa pihak ketiga dalam menjalankan perannya dapat melakukan tindakan-tindakan seperti membangun komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik sesuai dengan situasi dan kondisi

yang dihadapi, membuka dan menetralkan tempatberlangsungnya proses *problem solving*, menetapkan batas waktu danmemberi sumber daya tambahan terhadap pihak yang berkonflik.

Memodifikasi struktur isu maksudnya adalah bahwa pihak ketiga dalammenjalankan perannya dapat melakukan tindakan-tindakan seperti membantupihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi berbagai isu dan alternatifyang tersedia, dengan membantu mereka mengepak dan mengurutkan isu-isu tersebut sedemikian rupa sehingga mengarah kepada kesepakatan dan denganmemperkenalkan berbagai isu dan alternatif baru yang tadinya tidak terjadipada para pelaku konflik itu sendiri.Mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan motivasipihak-pihak yang berkonflik maksudnya adalah bahwa pihak ketiga dalammenjalankan perannya dapat melakukan tindakan-tindakan seperti memotifasipihak yang berkonflik untuk membuat konsesi tanpa harus kehilangan muka,kepercayaan, ketidakrasionalan, momentum dan otonomi.

Selain dari pemaparan tentang hal tersebut di atas mengenai ruang lingkup teori resolusi konflik, dan intervensi pihak ketiga melalui mediasi dan negoisasi, penulis juga akan memaparkan teknologi resolusi konflik Nabi Muhammad SAW.

Nama harum Rasulullah Muhammad SAW sekarang ini banyak dicela karena banyak kejadian kekerasan yang senantiasa diidentikkan kepada kelompok Islam. Pengambilan kesimpulan yang secara sengaja dibuat premature sangat sering disuarakan untuk mendeskreditkan Islam, yang ujungnya akan disematkan dalam

pribadi pembawa Risalah Islam. Sudah banyak penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab.

Namun jika kita lihat sejarah secara jernih, Rasulullah sangat jauh dari tuduhan-tuduhan tanpa dasar tersebut, bahkan Rasul merupakan pemimpin humanis sejati yang jauh dari tradisi kekerasan yang waktu itu sangat menggejala. Rasul mampu membawa masyarakat nomaden, temperamental, dan suka berperang menjadi masyarakat menetap, yang santun dan cinta damai.

Beberapa kasus yang akan dipaparkan berikut merupakan sebuah gambaran kasar bagaimana sang *al-Amin* memiliki teknologiresolusi konflik yang sedemikian menembus hamparan ruang dan waktu. Banyak persoalan pelik mampu disikapi dengan *treatmen* yang sederhana. Masyarakat yang selama ini tidak memiliki kemampuan diplomasi yang elegan selain dengan diplomasi kekerasan, dibimbing dalam wajah diplomasi yang humanis dan prospektif.<sup>22</sup>

Dari beberapa kasus resolusi konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dalam beberapa peristiwa seperti resolusi konflik kasus Hajar Aswad, resolusi konflik dalam mempersatukan antara Muhajirin dan Anshor, resolusi konflik Piagam Madinah, resolusi konflik perjanjian Hudaibiyah, dan resolusi konflik Futuh Makkah, beberapa peristiwa tersebut ternyata kesemuanya dijalankan dengan berbagai ragam metode dan cara, serta memenuhi prasyarat resolusi konflik.

Rasul juga mengembangkan resolusi konflik melalui persyaratan terjalannya proses komunikasi yang efektif kepada sasaran dengan pemilih teknik dan metode

---

<sup>22</sup> Surwandono, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal. 34-35



komunikasi yang akurat. Rasul yang memiliki sifat *tabligh*(menyampaikan) memungkinkan dari setiap resolusi yang disampaikan dengan bahasa yang dimengerti kaumnya. Bahkan dalam kasus Hudaibiyyah, ketika Suhail tidak bisa mengerti apa itu *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* Rasul bisa menerima sifat Allah tersebut dihapus dalam naskah Hudaibiyyah. Juga dengan nama Rasulullah Muhammad, yang juga tidak bisa dimengerti oleh Suhail maka Rasul menerima ketika Suhail hanya mampu mengerti Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah. Dalam pidato yang disampaikan kepada kaum Muslim sebelum berangkat ke Makkah pun disampaikan dengan lugas demikian ketika di Makkah disampaikan dengan bahasa yang lugas dan tegas, tidak bercabang-cabang yang memungkinkan orang Makkah menjawab dengan lugas dan tegas pula. Naskah Piagam Madinah pun disampaikan dengan bahasa yang lugas, dan tidak ragu-ragu. Jika terdapat pelanggaran maka akan dihukum dengan syariat Islam, apakah itu dari kaum Muslimin ataupun Nasrani dan Yahudi.

Dalam setiap resolusi yang disampaikan senantiasa dilandasi klausul tentang watak kejujuran untuk menerima kenyataan dari apa-apa yang sudah disepakati. Sifat rasul yang dikenal dengan *shidiq* sangat membantu berhasilnya resolusi konflik. Dalam kasus piagam Madinah, Rasul mengajak kepada kaum yang terlibat untuk mengembangkan sikap ini secara bertanggungjawab, dan sekali-kali umat Islam dilarang untuk ingkar janji, demikian pula dalam konteks Hudaibiyyah meski Rasul mendapati sahabatnya meminta-minta agar menerima orang yang dianiaya oleh kaum Quraisy untuk bertahan di Madinah, namun itu bertentangan kepada naskah perjanjian Rasul pun tidak bisa membela lebih jauh selain berpesan sabar dan taqwa.

Baru ketika orang-orang Yahudi dan Makkah melakukan pelanggaran maka batallah perjanjian tersebut sebelum masa berlakunya habis.<sup>23</sup>

Secara keseluruhan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, konflik terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini Bangsa Moro dan Pemerintah Filipina memiliki perbedaan tujuan dan kepentingan. Kepentingan Bangsa Moro dalam konflik ini adalah mempertahankan wilayah Mindanao serta berusaha memisahkan diri dari pemerintah Filipina atau paling tidak mendapat otonomi khusus bagi wilayah Mindanao. Sedangkan kepentingan Pemerintah Filipina ialah menguasai wilayah Mindanao untuk Negara Filipina dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah penting bagi Filipina dengan kekayaan alam yang melimpah serta posisi strategi di kawasan Asia Tenggara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Data**

Metode yang penulis gunakan adalah jenis deskriptif – kualitatif, metode ini pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus ini memiliki ciri-ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang

---

<sup>23</sup> Surwandono, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*. Hal. 42

demikian memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini.<sup>24</sup>

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap ini penulis akan melakukan penelitian literatur dalam pengumpulan sumber karya ilmiah ini. Proses dalam melakukan pencarian sumber – sumber melalui buku – buku, skripsi, jurnal, dan artikel.

Dalam penelitian kali ini, penulis hendak mewancarai akademisi asal Indonesia yang sebelumnya telah mengkaji tema yang serupa, mewancarai masyarakat Filipina melalui *e-mail* atau telepon serta mengumpulkan informasi yang valid dari media, terkait objek kajian.

## **3. Teknik Analisa Data**

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klarifikasi berupa pengelompokan/pengumpulan dan pengategorian data ke dalam klas-klas yang telah ditentukan. Apabila dijumpai data terlalu banyak dan aneka ragamnya penafsiran

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) .Hal. 68-69

maka dapat dimampatka/diperas kedalam bentuk tersebut guna menjawab maupun menguji hipotesa.

#### **H. Garis – garis besar isi skripsi**

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis sengaja memberikan deskripsi pada tulisan ini, yang disusun berdasarkan urutan bab. Mulai dari bab I sampai dengan IV, yang secara umum dibagi sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, serta beberapa masalah pokok dalam skripsi ini. Di antaranya, rumusan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan sebuah pengantar pada inti pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum konflik Moro di Mindanao, serta melihat bagaimana sejarah masuknya islam di Filipina.

BAB III, berisi tentang analisis pola pemetaan konflik Moro di Mindanao Filipina Selatan, dan resolusi konflik melalui mediasi dan negosiasi.

BAB IV, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi seluruh uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sekaligus jawaban terhadap permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONFLIK BANGSAMORO MINDANAO DI FILIPINA SELATAN**

#### **A. Kelompok Etnik di Filipina**

Filipina merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang terletak di bagian Barat Daya lautan teduh. Negara yang ber-ibukota Manila ini mempunyai luas wilayah 301.000 km<sup>2</sup> yang mencakup 7100 pulau. Dua pulaunya yang terbesar adalah pulau Luzon di Utara dengan luas 104.699 Km, dan pulau Mindanao di bagian Selatan dengan luas 94. 630 Km<sup>25</sup>. Di Utara Filipina berbatasan dengan laut Cina dan Taiwan, di Selatan dengan wilayah laut kepulauan Indonesia, sedangkan di Timur dengan Samudra Pasifik dan di Barat dengan Laut Cina Selatan.

Jumlah penduduk Muslim Filipina sejak adanya sensus penduduk tahun 1903 oleh Amerika Serikat, mengalami peningkatan. Namun dalam hal ini tidak ditemukan data penduduk Filipina pada masa Spanyol. Pada tahun 1903 penduduk Muslim berjumlah 763.500, kemudian meningkat pada tahun 1918 sebanyak 1.314.000 jiwa. Kemudian dua tahun setelah Filipina merdeka, 1948 jumlah penduduk Muslim menjadi 1. 9234. 000 jiwa.

Dari sensus penduduk tahun 1990, penduduk Muslim Filipina berkisar antara lima sampai enam juta jiwa, atau sekitar 8, 5% dari total penduduk negeri itu yang

---

<sup>25</sup>Alfian, *Peran Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik. Kasus Indonesia dan Libya dalam Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF)*, (Jakarta: UI:2000). Hal 23

berjumlah ± 66.000.000.<sup>26</sup>Pada bulan Juli 2001, diketahui total penduduk Filipina berjumlah 82. 841. 518 jiwa. Dari total jumlah tersebut, 83 % diantaranya beragama Katolik, 9 % Protestan, 5 % Islam dan 3 % Budha dan lain-lain. Adapun mayoritas Muslim menempati bagian Selatan Filipina seperti Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu, Palawan, dan Tawi-tawi.<sup>27</sup>

Penduduk asli Filipina merupakan orang-orang yang telah mendiami wilayah Filipina sejak awal. Sampai kini, setidaknya ada tiga suku bangsa yang dianggap sebagai penduduk asli Filipina, yaitu:<sup>28</sup>

1. Negrito

Suku bangsa negrito ini mendiami wilayah sekitar laut Sulu. Mereka adalah suku bangsa pertama yang mendiami wilayah Filipina. Mereka mengembangkan pertanian dataran rendah, namun kemudian terdesak ke daerah pegunungan.

2. Melayu

Suku bangsa Melayu merupakan kelompok penduduk kedua yang datang ke Filipina. Mereka datang dan kemudian melakukan kawin campur

---

<sup>26</sup> Cesar Adib Majul, *Filipina dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Mizan, 2001). Hal. 65

<sup>27</sup> Alfian, *Peran Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik. Kasus Indonesia dan Libya dalam Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF)*, (Jakarta: UI:2000). Hal. 36

<sup>28</sup> Lamijo, Syarfuan Rozi, *Demografi dan Sejarah Kolonisasi di Filipina*, (Jakarta: LIPI, 2003). Hal. 23

dengan orang Negrito. Selanjutnya mereka terbagi ke dalam berbagai kelompok yang berbeda dan tersebar ke wilayah lain di Filipina.<sup>29</sup>

### 3. Igorit dan Ifugao

Orang-orang Igorit dan Ifugao mendiami wilayah pegunungan Cordillera di bagian Utara Filipina. Mereka sejak ratusan tahun silam terkenal sebagai petani terasing di Banaue. Daerah tersebut saat ini merupakan salah satu tempat wisata yang favorit.

Dari tiga suku asli Filipina, kemudian berkembang menjadi banyak etnik. Setidaknya di Filipina terdapat lebih dari 75 kelompok etnis yang sebagian besar di antaranya merupakan keturunan Melayu, di mana saat ini sebanyak 91% merupakan kelompok Melayu Kristen dan 4% Melayu Muslim. Selebihnya adalah 1,5% Cina dan kelompok etnis yang lain sebesar 3%. Adapun kelompok-kelompok etnis yang ada di Filipina adalah sebagai berikut:

#### 1. Kelompok etnis yang berada di Pulau Luzon, antara lain:

Ivatan, Ilocano, Tinggian, Apayao, Kalinga, Balango, Kankanaey, Bago, Bontoc, Ifugao, Ibaloi, Ikalahan/Kalanguya, Iwak, Isinay, Pengasinan, Ga'dang, Ibanag, Itawit, Malaweg, Yigad, Ilongot, Kampangan, Palanan, Tagalog, Bicol, Negrito, dan Sambal.

#### 2. Kelompok etnis yang berada di Kepulauan Visayas, antara lain:

Masbateno,

---

<sup>29</sup> Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam : Studi Harakah Darul Islam dan MNLF* (Jakarta: Darul Falah, 2003). Hal. 135

Abaknon, Rombloanon, Bantoanon, Aklanon, Kinitaya/Hamtikanon, Hiligaynon, Sulod, Bikidnon, Boholano, Cebuano, dan Waray.

3. Kelompok etnis yang berada di Pulau Mindanao antara lain:

Manabo, Sangil/Sangir, Maranao, Ilanun, Tiruray, Tasaday, T'boli, B'laan, Kamiguin, Subanun, Mamanwa, Butuanon, Kamayo, Bagobo, Mandaya, Klagan, dan Kalibugan.

4. Kelompok etnis yang mendiami Pulau Palawan antara lain:

Tagbanwa, Agutayanaen, Kuyonen, Pala'wan, Milibog, Batak, dan Taut Batu.

5. Kelompok etnis yang mendiami Pulau Sulu/Tawi-tawi antara lain:

Yakan, Sama, Sama dilaut, Tausug, dan Jama mapun.

Dari 75 kelompok etnis di Filipina, masyarakat Muslim Filipina diklasifikasikan menurut 12 kelompok etnik, yakni: Manguindanao, Maranao, Iranum, Tausug, Samai, Yakan, Jama mapun, Palawani, Kalagan, Kalibugan, Sangil dan Badjo.<sup>30</sup> Dengan demikian, Moro pada dasarnya hanya sebutan bangsa Spanyol terhadap Muslim Filipina, bukan nama etnik. Karena masyarakat Muslim di Filipina terdiri dari berbagai etnik.

Mayoritas masyarakat Muslim tinggal di bagian Selatan Filipina, yakni di Pulau Mindanao dan di Kepulauan Sulu. Orang Manguindanao merupakan kelompok terbesar dan paling banyak tinggal di daerah Cotabato di Mindanao, Sultan Kudarat, Cotabato Utara dan Selatan. Orang Maranao tinggal di dua

---

<sup>30</sup> Lihat di *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Hal. 65



propinsi Lanao der Sur dan Lanao del Norte. Iranun atau Illanum mendiami daerah Lanao sekitar Teluk Illana dan daerah sebelah Utara Cotabato. Tausug dan Samal tinggal di Kepulauan Sulu. Jama Mapun tinggal di Cagayan desulu. Masyarakat Kalangan tinggal di sepanjang pantai Teluk Davao. Orang Yakan di Basilan. Sangil tinggal di Davao. Orang Kalibugan tinggal di Zamboanga del Sur. Sedangkan masyarakat Palawani tinggal di Pulau Palawan Selatan dan orang Molbog di dekat Pulau Balabae dekat pantai Utara Kalimantan.

31

Secara geografis, masyarakat Moro yang terdiri dari banyak etnik mendiami bagian Selatan Filipina dan memiliki identitas tersendiri. Dari segi sejarah maupun secara sosio kultural berbeda dengan orang Filipina Utara. Sebutan Moro sendiri berasal dari bangsa Spanyol yang datang ke Filipina. Hal ini bisa dimaklumi karena masyarakat Muslim Filipina mempunyai kepercayaan yang sama dengan bangsa Moor yang sejak lama mendiami Spanyol.<sup>32</sup>

Ada lebih dari seratus bahasa dan dialeg berbeda di Filipina. Namun bahasa Tagalog digunakan oleh lebih dari lima belas juta penduduk Filipina, sedangkan bahasa Inggris dimengerti oleh tak kurang dari tiga belas juta penduduk Filipina.

Adapun beberapa bahasa utama di Filipina antar lain:

---

<sup>31</sup>Alfian, *Peran Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik. Kasus Indonesia dan Libya dalam Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF)*, (Jakarta: UI:2000). Hal. 24

<sup>32</sup>Lihat di *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Hal. 65

1. Tagalong dan Cebuanon, dipakai di Cebu, Bohol, Negros Occidental, Bastern Leyte, dan sebagian Mindanao.
2. Hiligaynon, dipakai di Negros Occidental dan propinsi Panay.
3. Waray, dipakai di Samar dan Western Leyte.
4. Bikolano, dipakai di Propinsi Bikol.
5. Kampapangan, digunakan di Pampangan dan Tarlac.
6. Ilokano, Digunakan di Pengasinan, La Union dan propinsi Ilocos.
7. Manguindanao, digunakan di beberapa wilayah Muslim Mindanao.
8. Tausog, digunakan oleh orang-orang Islam Zamboanga dan Kepulauan Sulu.<sup>33</sup> Banyaknya etnik dalam masyarakat Muslim Filipina menyebabkan tidak ada bahasa khusus yang digunakan masyarakat Muslim Filipina, namun setidaknya mayoritas menggunakan bahasa Tausog dan Manguindanao.

Adapun sistem sosial dalam masyarakat Moro pada masa kolonial terbagi menjadi tiga kelas, yakni kelas Datu, orang bebas, dan budak. Kelompok Datu merupakan keturunan aristokrat, kaya, memiliki jabatan politik, dan status sosial yang tinggi. Orang bebas (*freeman*) merupakan orang yang tidak memiliki kekayaan, tidak punya prestise ataupun pengikut, tapi bukan berarti budak. Sedangkan budak adalah kelas paling rendah. Saat ini budak tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah Datu dan orang biasa.

---

<sup>33</sup> Lamijo, Syarfuan Rozi, *Demografi dan Sejarah Kolonisasi di Filipina*, (Jakarta: LIPI, 2003). Hal. 27

## B. Dinamika Islam dan Bangsamoro di Mindanao

Sebelum membahas lebih jauh mengenai dinamika Islam Moro di Mindanao, terlebih dahulu penulis akan memberikan pemaparan mengenai kasultanan dan “*Tarsilas Sulu*” awal masuknya Islam di Filipinadan “*Manguindanao Tarsilas*”. Untuk melacak keberadaan Kasultanan Sulu di Mindanao, para peneliti menggunakan informasi dari “*Tarsilas Sulu*”<sup>34</sup>.

*The Sulu Genealogy clearly states that the sultanate was established after the missionary activities of a certain Karim ul-Makhdum, followed a few years by the arrival of Rajah Baguinda who was accompanied by courtiers who were presumably Muslims. Judging by their names, most of the Sulu chiefs and leaders who were to accept Rajah Baguinda as their ruler must have been Muslims. In brief, the establishment of the sultanate was based on the consent given to it by a generally Islamized people. Thus when the “tarsila” says that the first Sultan “established a religion for Sulu” and that the people accepted the new religion and declared their faith in it, “it only means that their political structure was now based on Islam and not that the first Sultan originally introduced the faith.”*<sup>35</sup>

Silsilah Sulu (biasa juga disebut *Tarsilas Sulu*) berbicara tentang masuk dan berkembangnya Islam ke Filipina yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kesultanan Sulu. Namun dari beberapa pembacaan mengenai hal tersebut,

---

<sup>34</sup>Tarsilas merupakan sebuah hikayat yang ditulis oleh para sejarawan di Mindanao yang menggambarkan tentang silsilah kerajaan Sulu di Mindanao.

<sup>35</sup> Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainnury (Jakarta: LP3ES, 1989).

ditemukan adanya beberapa Silsilah Sulu dan Tarsilah Sulu yang kadang-kadang satu dan lainnya tidak sama, bahkan bertentangan. Hal itu disebabkan adanya campur aduk antara dongeng atau mitos dan kenyataan sejarah. Karenanya diperlukan menggunakan seluruh Silsilah dan Tarsilah Sulu yang beragam dan kemudian melakukan analisa sumber, baru membuat kesimpulan.<sup>36</sup>

Hampir semua Silsilah bermula pada masa Rapa Sipad (bahasa sansakerta :*Raja Shiripaduka*) memerintah di Pulau Jolo, datanglah seorang Muslim bernama Tuan Masha ika, ke suatu tempat yang disebut *Maimbung* (bagian selatan Pulau Sulu). Sebuah batu nisan atas nama *Miqbal*, dengan tanggal 1310, ditemukan di Badatto, tidak jauh dari Jolo, Pulau Sulu. Penemuan batu nisan inilah yang dijadikan salah satu bukti arkeologis masuk dan berkembangnya Islam di Filipina.<sup>37</sup> Pada waktu itu masyarakat Pulau Jolo masih menyembah berhala dan *animisme*. Karena beberapa kelebihan Tuan Masha ika, dia diterima dan dihargai oleh masyarakat setempat, bahkan kemudian dinikahkan dengan seorang puteri Rapa Sipad. Tuan Masha ika berputera tiga orang, seorang bernama Aisha. Tuan Hakim (berputera empat orang laki-laki Tuan Da'im, Tuan Buda, Tuang Bujang dan Tuan Muku), dan seorang lagi puteri yang tidak dikenal namanya. Keempat putera dari Tuan Hakim (berarti cucu dari Tuan Masha ika) memerintah di

---

<sup>36</sup> Sebuah artikel yang cukup lengkap mengenai Tarsilah atau Silsilah Sulu, telah ditulis oleh Cesar Adib Majul, "Suatu Analisa terhadap Silsilah Sulu", dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussein, *Islam di Asia Tenggara, Perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1989). Hal. 98-101

<sup>37</sup> Cesar Adib Majul, *MORO Perjuangan Muslim Filipina Selatan*, terjemahan dari buku *al-Muslimun fil Filipin*, oleh H. Salim Basyarahil, yang juga terjemahkan dari buku *Moslem in the Philippines* oleh Dr. Nabil Shubhi (Jakarta: al-Hilal, 1987). Hal 21

Maimbung<sup>38</sup>. Inilah titik awal masuknya Islam di Filipina. Selanjutnya datang lagi orang Arab bernama Karim al-Makhdum bergelar Syarif Awliya, bergabung dengan bangsawan Tagimaha di Buansa, dan membangun sebuah Masjid disini<sup>39</sup> Kedatangan Karim al- Makhdum dianggap sebagai penyebaran Islam secara lebih intensip. Kemudian datang seorang bangsawan dan pendakwah dari Minangkabau bernama Raja Baguinda bersama beberapa orang pengikutnya. Pada awalnya sempat terjadi peperangan antara Raja Baguinda dengan Bangsawan Tagimaha dan Karim al-Makhdum, tapi kemudian mereka bekerjasama untuk memajukan Islam di Buansa, bahkan kemudian Raja Baguinda telah diangkat menjadi pimpinan Buansa. Selanjutnya datang lagi seorang Arab bernama Sayed Abu Bakar, yang telah menentang berturut-turut di Palembang, Brunei, akhirnya sampai di Buansa. Dikisahkan bahwa Sayed Abu Bakar menikah Paramisuli, puteri Raja Baguinda, dan karena keahliannya dalam agama Islam, akhirnya diangkat menjadi Sultan di Sulu, dengan gelar Sultan Sharif.

Kasultanan Sulu mulai berdiri pada 1450 yang dipimpin oleh seorang Sultan Sharif ul-Hashim yang menunjuk bergelar “Paduka Mahasari Maulana al-Sultan Sharif ul-Hashim”. Gelar “Maulana” cukup menarik untuk dimaknai dalam politik, dalam bahasa Arab, “Maulana” memiliki makna memberikan perlindungan terhadap sesuatu. Sehingga dalam konteks politik di Mindanao gelar

---

<sup>38</sup> Artikel Muslim Filipina. *Islamica*, Vol. 3 No. 1 september 2008

<sup>39</sup> Lihat Mahayudin Haji Yahaya, *Islam di Alam Melayu*. (Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan pustaka, 1998). Hal. 11

“Maulana” dipahami sebagai bagian dari cara Sultan Sulu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Mindano dari penetrasi masyarakat luar.

Karakteristik kasultanan Sulu sangat dipengaruhi oleh karakter Islam di Indonesia yang berwajah Islam Kultural. Merujuk Tarsilas Sulu, Raja Baguinda merupakan salah seorang pangeran dari kerajaan Minangkabau di Sumatera yang melakukan migrasi politik ke Mindanao setelah terjadi huru-hara politik terkait dengan serangan Majapahit ke wilayah Sumatera. Hubungan sejarah politik ini juga membuat keterikatan faksi politik di Sulu dengan Indonesia sedemikian tinggi. Hal ini tercermin dari permintaan Nur Misuari dalam proses negosiasi dengan pemerintah Filipina, agar Indonesia menjadi fasilitator baik dalam *Tripoli Agreemen 1976*, *Jeddah Accord 1987*, maupun dalam *Final Peace Agreement 1996*.

Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan Kasultanan Maguindanao, sebagai salah satu kasultanan besar di Mindanao, para peneliti lebih cenderung merujuk kepada “*Maguindanao Tarsilas*”.

*With some minor differences or variations, the Maguindanao tarsilas narrate how the Sharif Muhammad. Kabungsuwan arrived on the shores of Mindanao with a sea-faring people, after a long voyage from Johore. It is claimed that the was a son of the Sharif Ali Zein ul-Abidin, an Arab from Mecca (or Hadhramaut) who settled in Johore where he married a daughter (or sister, in other accounts) of the Sultan Iskandar Julkarnain. Clearly what is meant here is that the Sharif married a princess of the royal family of Johore that was*

*descended from the dynasty founded by Iskandar Julkarnain, the first Malacca sultan. In the list of Malacca sultans, only one, the first bears his name, while in the list of the early Johore sultans, none bears it. For good chronological reasons, Muhammad Kabungsuwan could not have been a grandson of the first sultan of Malacca whose rule began around 1400. Consequently, it would have been more accurate to have stated that the Sharif Ali Zein ul-Abidin married into the Johore family that descended from Sultan Iskandar Julkarnain.*<sup>40</sup>

Sultan pertama di Kasultanan Maguindanao adalah Muhammad Kabungsuwan, atau kemudian dikenal sebagai “al-Masaikha” yang mulai memerintah di Kasultanan Maguindanao semenjak 1515. Kata Masaikha merupakan serapan dari bahasa Arab yang bermakna orang yang pantas menjadi pemimpin atau pemuka. Kata “Masaikha” masih satu akar kata dengan Sheikh (atau sering disebut Syech) yang bermakna pemuka masyarakat. Dalam konteks politik keagamaan, pilihan kata Shaikh juga dimaknai sebagai seorang yang terkemuka di zamannya, sehingga dapat disejajarkan dengan “Mujtahid”, yang mana fatwanya layak untuk diikuti.

Kasultanan Maguindanao banyak dipengaruhi corak formalism Islam sebagaimana yang dikembangkan beberapa negara bagian di Malaysia. Kecenderungan ini tidak terlepas dari ikatan sejarah bahwa sultan Kabungsuwan merupakan salah seorang keluarga kerajaan di Malaka yang melakukan migrasi

---

<sup>40</sup> Komentar Cesar Adib Majul tentang *Maguindanao Tarsilas*

politik ke Mindanao pasca terjadi penyerangan Malaka oleh kekuatan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque di abad ke 15 M. Keterikatan sejarah ini juga berimplikasi terhadap keterdekatan politik antara komunitas politik di Maguindanao dengan komunitas politik di Malaysia<sup>41</sup>. Dalam setiap perundangan yang melibatkan antara faksi politik di Maguindanao dengan pemerintah Filipina, ada kecenderungan yang berperan utama sebagai fasilitator adalah Malaysia.

Kekuasaan kasultanan Islam di Sulu maupun Maguindanao mewarnai struktur sosial dan masyarakat di Mindanao dalam kurun waktu yang sangat lama. Kasultanan Sulu berkuasa di wilayah Mindanao Kepulauan, yakni Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dan Palawan dalam kurun waktu lebih dari 5 abad, di mana terdapat 32 sultan yang memerintah semenjak 1450 sampai dengan 1936, dari Sultan Sharif Hashim sampai dengan Sultan Jamal al-Kiram II. Kasultanan Maguindanao berkuasa di wilayah Mindanao daratan yang meliputi wilayah Maguindanao, Cotabato, Lanao, Davao, Zamboanga dalam kurun waktu sekitar 4 abad, di mana terdapat 21 Sultan yang memerintah semenjak 1515 sampai dengan 1930, dari Sultan Sharif Hashim sampai dengan Sultan Mangigin.<sup>42</sup>

Kasultanan Sulu lebih banyak mengembangkan kekuasaan ke arah Barat laut, di mana dipahami banyak sejarawan Asia Tenggara, beberapa kerajaan Islam di Pattani banyak dipengaruhi oleh Kasultanan Sulu. Kasultanan Manguindanao lebih banyak mengembangkan kekuasaan ke arah utara maupun ke

---

<sup>41</sup>Surwandono. *Manajemen Konflik Separatisme*. Hal. 35

<sup>42</sup>Surwandono. *Manajemen Konflik Separatisme*. Hal. 37



Tenggara. Dalam banyak studi dari para sejarawan Asia Tenggara, kasultanan Sulu di wilayah Sulawesi maupun di Ternate Tidore, banyak dipengaruhi oleh kasultanan Manguindanao. Proses perluasan wilayah yang cenderung mengambil arah yang berbeda tersebut menjadi salah satu jawaban penting mengapa kedua kasultanan di Mindanao tersebut tidak terlibat perang satu sama lain.

Penguasaan kasultanan Islam di Mindanao yang berlangsung sangat lama tersebut mampu mengubah peta demografi, budaya, sosial, dan tata nilai dalam masyarakat Mindanao. Jumlah penduduk Muslim di Mindanao pada 1918 mencapai 80% penduduk di Mindanao, sedangkan masyarakat lokal Mindanao (atau yang kemudian dikenal dengan Lumads), jumlahnya tidak lebih dari 10% penduduk Mindanao. Tata nilai sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik di Mindanao lebih merepresentasikan tata nilai yang diadopsi dari nilai-nilai Islam dibandingkan dengan tata nilai lokal Lumads, ataupun tata nilai Kristen.

Pelembagaan identitas politik Bangsamoro di komunitas Islam terbentuk sebagai bagian dari politik relasi antara kasultanan Sulu dan Manguindanao dalam menghadapi hal yang sangat serius dari pemerintah kolonial Spanyol yang hendak meluaskan wilayah kekuasaannya di sekitar wilayah kasultanan Manguindanao, dan wilayah kasultanan Sulu di sekitar Palawan di sekitar tahun 1635. Terbangunnya koalisi politik antara kasultanan Sulu dan Manguindanao sedikit banyak disebabkan oleh pilihan Spanyol yang menganggap kasultanan Sulu dan Manguindanao sebagai realisasi politik yang tunggal. Spanyol memandang bahwa setiap kasultanan Islam sebagai cerminan masyarakat

“Juramentados”.<sup>43</sup> Pemerintah kolonial Spanyol menyebut dua kasultanan di Mindanao dengan sebutan “Moro” karena kedua kasultanan tersebut menolak kekuasaan Spanyol yang hendak mentransformasikan masyarakat di Sulu dan Manguindanao dari masyarakat Juramentados menjadi masyarakat yang beradab sebagaimana halnya komunitas Islam di Mauritius yang menolak terhadap segala bentuk upaya pemerintah Spanyol untuk menjadikan wilayah Mauritius menjadi bagian kekuasaan Spanyol di Eropa.

Pemerintah Spanyol di Filipina menyebut Kasultanan Sulu dan Manguindanao sebagai Moro sebagai bentuk propaganda Spanyol untuk menjatuhkan citra Islam di kalangan masyarakat Mindanao. Islam dicitrakan sebagai agama yang menghalalkan perang, penghalalalan beragam pembunuhan, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Jatuhnya citra Bangsamoro di Mindanao diharapkan dapat mempermudah penguasaan Spanyol atas kekuasaan kasultanan Islam di Mindanao. Pada sisi yang lain, pemerintah Spanyol mencitrakan pemerintah Spanyol di Filipina sebagai pemerintah yang beradab, cinta damai, modern, dan hendak membebaskan masyarakat Mindanao dari segala bentuk keburukan yang ditimbulkan oleh Bangsamoro.

Propaganda pemerintah Spanyol di Filipina untuk melakukan proses inferioritas Islam dalam identitas tunggal Bangsamoro menyebabkan interaksi antara kasultanan Sulu dan Manguindanao menjadi semakin intensif. Kasultanan

---

<sup>43</sup> Juramentados adalah masyarakat yang terbelakang, barbar, kasar, dan tidak beradab. Lihat dalam buku Surwandono. *Manajemen konflik separatisme*.

Sulu dan Manguindanao kemudian mengesampingkan pemaknaan identitas Islam kultural yang selama ini telah membuat keduanya mengalami hubungan yang kurang harmonis, dan menempatkan pemerintah kolonial Spanyol sebagai musuh bersama.

Padahal merujuk beberapa studi tentang Tarsilas Sulu dan Manguindanao, kasultanan Sulu dan kasultnan Manguindanao sebelumnya bukanlah komunitas politik yang monolit dan sering terlibat konflik satu sama lain dalam memperebutkan kekuasaan. Islam di Sulu lebih mencerminkan sebagai gejala Islam kultural, di mana Islam banyak menerima bentuk-bentuk akulturasi dengan budaya lokal, sedangkan Islam di Manguindanao lebih mencerminkan sebagai gejala Islam tidak banyak menerima bentuk-bentuk akulturasi dengan budaya lokal.<sup>44</sup>

Kasultanan Sulu dan Manguindanao menyadari bahwa dengan membangun kohesivitas politik dengan landasan kesamaan agama yang melekat di dalamnya identitas politik Bangsamoro, maka kekuatan kasultanan akan menjadi semakin kuat dalam menghadapi serangkaian serangan militeristik dari pemerintah kolonial Spanyol.

Kohesivitas antara Sulu dan Manguindanao juga dipergunakan oleh para elite kasultanan di Sulu maupun Manguindanao dalam merespon kebijakan Amerika Serikat yang menggabungkan kepulauan Mindanao sebagai bagian dari wilayah

---

<sup>44</sup> Lihat dalam Adib Majul, *ibid.*, atau dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique, Yasmin Hussain, *Readings on Islam in Southeast Asia*, (Singapura, ISEAS, 1985). Hal. 184-185

Filipina merdeka melalui Bacon Declaration 1926. Para elit kasultanan Sulu dan Manguindanao beserta para datus di Mindanao mengeluarkan pernyataan sikap melalui Dansalam Derclaration 1936, untuk meminta Amerika Serikat membatalkan Bacon Declaration serta menjadikan wilayah di Mindanao sebagai bagian dari wilayah prektorat Amerika Serikat.

Islam dan identitas Moro juga dipergunakan para elite yang berbasis kasultanan dan elite terpelajar di Manguindanao maupun Sulu untuk menentang kebijakan pemerintah Filipina, baik pada era Manuel Quezon, Macapagal, maupun Ferdinand Marcos terkait dengan kebijakan migrasi penduduk Luzon dan Visayake Mindanao, dan serangkaian kebijakan marginalisasi masyarakat Moro di Mindanao. Penentangan masyarakat Moro tersebut diartikulasikan dengan Manifesto Bangsamoro sebagai tonggak pembentukan organisasi Bangsamoro National Liberation Front (MNLF) dan dijadikan sebagai alat perjuangan bersama Bangsamoro dalam menghadapi kebijakan pemerintah Filipina yang diskriminatif.

Pertanyaan penting yang selalu menggelitik para pelajar islam di Mindanao adalah mengapa para elite muslim di Mindanao memilih untuk mengartikulasikan Islam sebagai basis identitas masyarakat Bangsamoro di Mindanao. Adib Majul sebagai peneliti Mindanao yang paling berpengaruh dalam kajian Islam di

Filipina, menemukan 4 alasan utama mengapa elite Muslim di Mindanao memilih untuk mengartikulasikan Bangsamoro dan Islam sebagai identitas tunggal.<sup>45</sup>

1. Islam menjadi alat pemersatu kepentingan kasultanan Sulu maupun Maguindanao dalam menghadapi masuknya penetrasi Spanyol maupun Amerika Serikat di kepulauan Mindanao dalam kurun waktu yang sangat lama. Koalisi antara kasultanan Sulu dan Maguindanao dengan mempergunakan kesamaan identitas Islam, berhasil dalam membendung serangkaian kebijakan penetratif dari pemerintah kolonial Spanyol di Filipina yang hendak memperluas wilayah kekuasaan di Mindanao, maupun serangkaian upaya Amerika Serikat untuk menguasai Mindanao di tahun 1906.
2. Islam dipahami oleh para elite politik dan kasultanan Islam di Mindanao sebagai satu-satunya alasan agar masyarakat Bangsamoro benar-benar berbeda dengan masyarakat Kristen Filipina. Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat Bangsamoro memiliki alasan yang kuat untuk menolak setiap kebijakan pemerintah Filipina yang hendak mengintegrasikan Bangsamoro ke dalam wilayah Filipina. Masyarakat Bangsamoro di tahun 1935, memandang bahwa tradisi Islam dan tradisi Kristen di Mindanao sebagai tradisi yang saling kontradiktif. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatik masyarakat Bangsamoro dalam berinteraksi dengan pemerintah kolonial Spanyol di Filipina yang

---

<sup>45</sup> Lihat dalam Majul, *Dinamika Islam Filipina, Jakarta*.(LP3ES.1990). Hal. 8-11

mengidentikkan diri sebagai komunitas Kristen, yang sering kali interaksi keduanya lebih banyak berakhir dengan konflik dan perang.

3. Para ulama juga senantiasa mensosialisasikan kepada penduduk Bangsamoro di Mindanao tentang arti penting kesempurnaan Islam dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan orang Islam dilarang untuk mempertukarkan identitas dan keyakinan Islam di luar Islam dalam kondisi apa pun. Mempertukarkan ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam diyakini sebagai sebuah perniagaan yang merugikan. Sehingga para ulama Islam menafsirkan bahwa hanya dengan identitas Islamiah, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Mindanao dapat diselesaikan. Masyarakat Islam di Mindanao menempatkan ulama sebagai figur yang sangat dihormati, dan ditaati apa-apa yang menjadi perintah maupun larangan-Nya. Tarsilas Sulu maupun Maguindanao menunjukkan bahwa para pemimpin politik maupun agama di masyarakat Mindanao ditempatkan sebagai “Maulana” maupun sebagai “Mashaik”, sehingga apa pun yang disampaikan sebagai sebuah kebenaran.

Kembalinya para kader ulama maupun intelektual, yang dikirim oleh elite-elite kasultanan Sulu maupun Maguindanao untuk belajar ilmu-ilmu agama ke Timur Tengah, Mesir ataupun yang belajar ke Universitas di Filipina untuk belajar tentang ilmu sosial dan politik memberikan pengaruh yang luas tentang arti pentingnya artikulasi Islam sebagai

identitas dalam mewujudkan terbentuknya negara Bangsamoro merdeka. Hal ini tercermin dari banyaknya elite muda Bangsamoro yang kemudian menjadi pemimpin politik dan perlawanan Bangsamoro terhadap pemerintah Filipina, seperti Nur Misuari yang kemudian menjadi ketua MNLF, Salamat Hasim yang menjadi ketua MILF, Cesar Adib Majul yang menjadi akademisi yang berpengaruh di Universitas Filipina menyerukan pentingnya penyelesaian konflik Mindanao secara damai, dan Abdulrajak Jaljalani yang menjadi ketua Abu Sayyaf Group.

4. Mengartikulasikan identitas Islam memiliki dampak positif bagi masuknya bantuan dari masyarakat Islam internasional. Islam juga dipahami elite-elite Bangsamoro di Mindanao sebagai agama yang banyak dipeluk oleh penduduk dunia, maupun penduduk di regional Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia yang menjadi moyang dari masyarakat Islam di Mindanao. Dengan banyaknya pemeluk Islam, maka problem masyarakat Islam di Mindanao dapat diinternasionalisasikan ke seluruh umat Islam di dunia, sehingga terbentuk sebuah opini besar bahwa problem umat Islam di Mindanao sebagai problem umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pemaknaan ini terkait dengan keberadaan konsepsi Islam tentang solidaritas Islam (*ukhuwah Islamiyyah*) yang bersifat mendunia (universal) memiliki potensi yang besar untuk dipergunakan membantu

menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat Islam di Mindanao.<sup>46</sup>

### **C. Kompleksitas Sejarah Konflik Mindanao**

Konflik Mindanao mulai muncul tatkala rezim kolonial Spanyol yang menguasai kawasan Filipina Utara, atau yang lebih dikenal dengan kepulauan Luzon, mencoba memperluas kekuasaan ke daerah selatan di sekitar kepulauan Mindanao. Rezim Spanyol hampir tidak mengalami perlawanan yang berarti menguasai wilayah kepulauan bagian tengah, yang lebih dikenal sebagai daerah Visayas. Namun, ketika Spanyol mencoba melakukan penetrasi kekuasaan ke wilayah Mindanao, terutama di bagian paling Selatan, rezim Spanyol mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari beberapa kasultanan Islam yang kukuh berdiri di Mindanao, yakni Kasultanan Manguindanao maupun Buayan serta Sulu. Spanyol berulang kali melakukan upaya untuk menguasai Mindanao dalam kurun waktu hampir 350 tahun, namun usaha tersebut mengalami kegagalan karena kohesifnya politik kasultanan Islam di Mindanao. Ketiga-ketiganya mampu membangun pertahanan yang kukuh untuk menghadapi berbagai strategi yang diterapkan pemerintah Spanyol untuk menguasai Mindanao secara keseluruhan.

Perpindahan kekuasaan Filipina dari Spanyol ke Amerika Serikat, pada awalnya mendapat respon positif baik dikalangan masyarakat Luzon, Visayas, dan Mindanao. Dalam konteks di Mindanao, Amerika Serikat mengembangkan cara-cara persuasif untuk melakukan penguasaan atas politik di Mindanao. Salah satu contoh

---

<sup>46</sup>Surwandono. *Manajemen Konflik Separatisme*. Hal. 44



cara persuasif yang ditunjukkan Amerika Serikat digambarkan oleh Thomas McKenna secara menarik. Amerika Serikat mengundang para sultan di Mindanao untuk jamuan makan yang diselingi dengan demonstrasi penggunaan senjata. Pola demonstrasi penggunaan senjata ini sebagai sebuah isyarat bahwa Amerika Serikat dapat menguasai Mindanao secara mudah dengan kekuatan senjata yang modern.<sup>47</sup>

Hubungan baik antara kasultanan Islam di Mindanao dengan pemerintah Amerika Serikat relatif terjaga. Program Amerikanisasi di wilayah Mindanao juga relatif diterima, meskipun sering kali menimbulkan iritasi-politik di beberapa kalangan terkait perbedaan norma-norma sosial dalam masyarakat. Amerika Serikat dalam melakukan transformasi nilai-nilai modern dalam masyarakat Mindanao juga dilakukan secara hati-hati agar tidak memperumit hubungan politik antara kasultanan di Mindanao dan kepentingan Amerika Serikat.

Pada periode 1946-1970, konflik Mindanao mengalami eskalasi penting yang ditandai dengan tetap berlangsungnya konflik vertikal antara masyarakat Bangsamoro dengan pemerintah Filipina, dan munculnya konflik horizontal antara masyarakat Bangsamoro dengan masyarakat non Moro di Mindanao. Konflik vertikal antara masyarakat Bangsamoro dan pemerintah Filipina diawali dari desakan masyarakat Bangsamoro terhadap pemerintah Filipina maupun Amerika Serikat yang tercermin dalam *Ambilbangsa* (HB 5682) pada 1947, yang menyatakan masyarakat Bangsamoro akan memisahkan diri dari pemerintah Filipina jika pemerintah Filipina

---

<sup>47</sup> Thomas Robert McKenna, *Muslim Rules and Rebels. Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*, (Manila, Anvil Publishing Inc, 1998).

tidak melakukan langkah-langkah persuasif dalam menyelesaikan status Mindanao secara damai maupun *Dansalan Declaration* yang meminta kepada Amerika Serikat agar Mindanao menjadi wilayah protektorat Amerika Serikat. Pemerintah Filipina tetap bersikukuh untuk memasukkan wilayah Mindanao sebagai wilayah administratif Filipina, dan tidak merespon *Ambilbansa HB 5682* dan *Dansalan Declaration*. Pemerintah Filipina menggunakan argumentasi dasar bahwa wilayah pemerintah Filipina adalah semua wilayah yang pernah menjadi koloni Amerika Serikat, yang meliputi Luzon, Visayas dan Mindanao. Pemerintah Filipina juga mengabaikan pandangan sejarawan Mindanao yang menyatakan bahwa posisi kasultanan Mindanao otonom atas kekuasaan Spanyol, bahkan Amerika Serikat sekalipun.<sup>48</sup>

Pemerintah Manuel Quezon tidak memedulikan tuntutan dari masyarakat Bangsamoro di Mindanao, justru menempatkan Mindanao sebagai salah satu asset penting untuk menyelesaikan problem yang ada di Luzon maupun Visayas seperti problem pertahanan dan investasi ekstraktif maupun agraris. Pilihan kebijakan Quezon ini terkait dengan ketersediaan lahan di Mindanao yang sangat luas dan ketersediaan sumber daya alam untuk investasi yang besar.

Pengelolaan Mindanao oleh Manuel Quezon maupun Ferdinan Marcos yang merugikan kepentingan masyarakat Mindanao menimbulkan reaksi keras dari elit

---

<sup>48</sup> Lihat dalam Jainal D. Rasul Sr, *Struggle for Identity: A Short History of The Filipino Muslim*, (Quezon City, East Kamias, 2003).

politik generasi tua maupun generasi muda. Datu Utdog Matalam<sup>49</sup>, menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah Marcos yang tidak aspiratif dalam merespon tuntutan masyarakat Bangsamoro. Datu Utdog Matalam kemudian mendeklarasikan politik pemisahan diri masyarakat Muslim di Mindanao dengan mendirikan MIM (*Moro Independent Movement*).

Pilihan untuk memisahkan diri juga datang dari kelompok muda, yang diorganisir oleh Nur Misuari<sup>50</sup> maupun Salamat Hashim<sup>51</sup>. Kedua tokoh ini merupakan kaum terpelajar Bangsamoro yang menempuh pendidikan tinggi di Manila maupun di Mesir.

Pemerintah Ferdinand Marcos dalam merespon keinginan masyarakat Bangsamoro di Mindanao untuk memisahkan diri dengan cara represif melalui pemberlakuan *Martial Law* di Mindanao. Mengaktifkan pemberlakuan *Martial Law*, pemerintah Marcos mengirim tidak kurang 100.000 pasukan ke Mindanao untuk melakukan penangkapan terhadap aktivis MIM maupun MNLF dengan tuduhan melakukan politik maker dan mengganggu ketertiban umum.

Konflik yang terus mendidih di kawasan Selatan akhirnya memuncak menjadi perang saudara setelah Presiden Ferdinand Marcos menyatakan diberlakukannya keadaan darurat militer pada bulan September 1972, akan tetapi MNLF sudah

---

<sup>49</sup>Seorang tokoh dari Kasultanan Manguindanao yang sekaligus sahabat karib dari Presiden Ferdinand Marcos.

<sup>50</sup> Nur Misuari adalah anak orang miskin dari suku Tausug di Sulu yang memilih untuk meneruskan studinya di University of Philippines dengan mengambil study ilmu politik, dan merupakan pimpinan MNLF

<sup>51</sup> Salamat Hashim adalah salah satu anak bangsawan di Maguindanao yang memilih study keagamaan daripada study politik sebagaimana halnya Nur Misuari, dan merupakan pimpinan MILF

melakukan persiapan yang baik mulai tahun 1969, kader-kader dikirim ke luar negeri untuk menjalani latihan militer dengan bantuan dari kaum ningrat Muslim yang menyimpan rasa tidak puas. Rombongan pertama, yang dikenal sebagai “Top 90” dan termasuk ketua MNLF Nur Misuari yang orang asli Tausug/Sama, menetap lebih satu tahun di pulau Pongkar dekat Pulau Pinang di Malaysia. Pada tahun 1970, menyusul “Gelombang 300” termasuk Al-Hajr Murad, yang menggantikan Hashim selaku ketua MILF setelah kematiannya pada juli 2003. Kemudian berangkat “Gelombang 67” atau kelompok bombardier, yang membawa keahlian baru dalam penggunaan artileri ringan dari Malaysia. Selanjutnya Libya menggantikan Malaysia sebagai tempat pelatihan utama mulai pertengahan 1970an, dan selama tahun 1980an, bahkan beberapa sumber juga menyebutkan Syiria melibatkan diri dalam pelatihan militan Bangsamoro<sup>52</sup>

Pada periode ini juga ditandai dengan konflik horizontal antara masyarakat Bangsamoro dengan masyarakat non Bangsaoro di Mindanao. Konflik antara penduduk migrant dengan penduduk di Bangsamoro Mindanao muncul saat para penduduk migrant melakukan pengambilalihan tanah dari penduduk Mindanao. Pengambilalihan tanah berdasarkan atas kebijakan pemerintah Filipina tentang pertahanan yakni akta registrasi tanah 1902, akta komisi Filipina No. 718 dan akta tanah umum 1903, yang memberikan pembagian tanah bagi penduduk migran dan menghapus tata pengelolaan tanah menurut hukum adat setempat. Implikasi penting pemberlakuan akta pertahanan bagi masyarakat Mindanao adalah hampir semua tanah

---

<sup>52</sup>Lihat dalam *International Crisis Group* 2004. Hal 5

di Mindanao yang tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan pemerintah akan diambil alih pemerintah sebagai tanah pemerintah. Pemerintah Filipina berhak melakukan pengelolaan tanah tersebut menurut kepentingan dan kebutuhan pemerintah.

Konflik pertahanan ini berkembang menjadi konflik yang berwatak primordial. Hal ini terkait dari kebijakan pemerintah Filipina yang memobilisasi etnis Visayas dan membentuk kekuatan sipil bersenjata untuk melakukan pengambilalihan tanah di Mindanao dan mempertahankan tanah yang sudah di ambil. Merujuk studi yang dilakukan oleh Cesar Adib Majul, dalam proses pengambilalihan tanah masyarakat Bangsamoro tersebut sering kali mempergunakan atribut-atribut keagamaan. Bahkan diiringi dengan beragam bentuk kekerasan dan pembunuhan.<sup>53</sup>. Kelompok politik Ilaga, yang melakukan pembantaian kepada komunitas muslim, ada kecenderungan dibiarkan oleh pemerintah Marcos sehingga dalam batas tertentu konflik pertahanan tersebut berkembang menjadi konflik antar agama di Mindanao.

Menyikapi serangkaian terror dan kekerasan tersebut, elite Bangsamoro kemudian juga melakukan mobilisasi kelompok sipil bersenjata dikalangan masyarakat Bangsamoro, yang mengidentikkan diri sebagai kelompok Baracuda. Kelompok Baracuda ini sering melakukan konfrontasi bersenjata dengan kelompok Ilaga maupun pemerintah Filipina. Kelompok Baracuda juga mengusung jargon-jargon peran agama untuk memacu semangat Bangsamoro untuk gigih

---

<sup>53</sup> Lihat dalam Cesar Adib Majul, *Muslim in the Philippines*, edisi ke-2, (Quezon City, University of the Philippines Press. 1973)

mempertahankan tanah dan harga dirinya. Mobilisasi kekuatan Bangsamoro juga dilakukan dengan menginternasionalisasi konflik Mindanao ke dunia Islam di seluruh dunia memberikan bantuan bagi komunitas Islam Mindanao atas nama agama.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Internasionalisasi konflik Mindanao dikupas dengan semangat oleh Solimon J. Santos Jr. *“The Philippines-muslim Dispute: International Aspects from Origin to Resolution”* makalah Seminar dalam Hague Convention for The Pasific Settlement of International Disputes.

### **BAB III**

## **RELASI PEMERINTAH DENGAN BANGSAMORO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MORO DI MINDANAO**

### **A. Pemetaan Konflik Mindanao Filipina Selatan**

Pemetaan konflik memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya.<sup>55</sup> Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.<sup>56</sup> Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula.

Dilihat dari kronologis momentum konflik Bangsamoro Mindanao di Filipina Selatan, maka penulis petakan konflik tersebut dengan menggunakan analisis model SIPABIO dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Hal. 100

<sup>56</sup> Fisher, Simon, dkk. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Hal. 22

## Sumber Konflik (*Source*)

### a. Konflik agama

Konflik di Filipina dimulai dengan kolonisasi yang dilakukan oleh orang Muslim Filipina dan kemudian oleh Kristen Filipino, keberbedaan kedua agama tersebut hingga sekarang masih berkompetisi untuk memperebutkan perhatian penduduk pribumi. Orang-orang Muslim bergeser ke Selatan Filipina ketika orang-orang Kristen menduduki Utara Filipina. Akar dari gerakan separatis di Filipina didalamnya adakultur dan agama yang jauh berbeda antara Kristen dan Muslim, dan Selatan bukanlah taklukan dari Kristen.<sup>57</sup> Ini berarti daerah Selatan yang pada awalnya didominasi oleh Muslim telah terusik dengan kehadiran agama Kristen sampai ke daerah ini. Konflik yang terjadi di Filipina mulai terjadi sejak kedatangan orang-orang Kristen Spanyol dan berhasil menduduki daerah Filipina Utara atau kepulauan Luzon.<sup>58</sup> Sejak saat itu orang-orang Spanyol yang ingin mendirikan Filipina sebagai daerah koloni dan memasukan penduduk ke dalam agama Kristen, dan terjadi perlawanan-perlawanan antara orang Spanyol dan penduduk pribumi Islam, dan dimenangkan oleh Spanyol.

Konflik masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di Utara. Untuk menggabungkan ekonomi *Moroland* ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat kapitalistis seperti *Land*

---

<sup>56</sup>.Hamish. K Wall, "*The Dynamics of Small Arms Tranfers in Southeast Asian Insurgencies*", Tesis: Master of Arts in Political Science di Universitas Canterbury. Hal. 81

<sup>58</sup> Cesar A. Majul, "*Dinamika Islam Filipina*", (Jakarta: LP3ES, 1989). Hal. 9



*Registration Act* No. 496 yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan dibawah sumpah. Kemudian *Philippine Commission Act* No. 718 (4 April 1903) yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datu, atau kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah. Demikian juga *Public Land Act* No. 296 yang menyatakan semua tanah yang tidak didaftarkan sesuai dengan *Land Registration Act* No. 496 sebagai tanah negara, *The Mining Law of 1905* yang menyatakan semua tanah negara di Filipina sebagai tanah yang bebas, terbuka untuk eksplorasi, pemilikan dan pembelian oleh WN Filipina dan AS, serta *Cadastral Act* yang membolehkan penduduk setempat (Filipina) yang berpendidikan, dan para spekulan tanah Amerika, yang lebih paham dengan urusan birokrasi, untuk melegalisasi klaim-klaim atas tanah. Pada intinya ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum Muslimin (tanah adat) oleh pemerintah kolonial AS dan pemerintah Filipina di Utara yang menguntungkan para kapitalis. Pemberlakukan *Quino-Recto Colonialization Act* No. 4197 menandai upaya pemerintah Filipina yang lebih agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao. Pemerintah mula-mula berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah Negara, sebelum membangun koloni-koloni pertanian yang baru. NLSA (*National Land Settlement Administration*) didirikan berdasarkan Act No. 441 pada 1939. Di bawah NLSA, tiga pemukiman besar yang menampung ribuan pemukim dari Utara dibangun di propinsi Cotabato Lama. Senator Manuel L. Quezon gigih mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang Utara dengan

tujuan untuk menghancurkan keragaman (*homogeneity*) dan keunggulan jumlah Bangsamoro di Mindanao serta berusaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Filipina secara umum. Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legalisasi dari pemerintah tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran orang-orang Utara ke Mindanao. Banyak pemukim yang datang, seperti di Kidapawan, Manguindanao, mengakui bahwa motif utama kedatangan mereka ke Mindanao adalah untuk mendapatkan tanah. Untuk menarik banyak pemukim dari utara ke Mindanao, pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan. Konsep penjajahan melalui koloni ini diteruskan oleh pemerintah Filipina begitu AS hengkang dari negeri tersebut. Sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Bangsamoro menjadi minoritas di tanah mereka.

Penduduk Kristen Filipino di Mindanao pada tahun 1910 hanyalah 20% dari penduduk Mindanao<sup>59</sup>. Mereka kebanyakan dari masyarakat Luzon yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang dikembangkan oleh Spanyol maupun Amerika Serikat, ataupun para misionaris yang dikirim oleh pemerintah kolonial Spanyol dan Amerika Serikat untuk mengajarkan ajaran Kristen sebagai salah satu cara membangun tertib sipil di Mindanao.

Kebijakan politik migrasi yang dirilis presiden Manuel Quezon, maupun Marcos pada 1970an telah mampu mengubah peta demografi Mindanao. Jumlah penduduk yang beragama Kristen melonjak sampai 80% penduduk di Mindanao dan

---

<sup>59</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

menjadi kelompok politik mayoritas. Sebagai kelompok politik mayoritas, Kristen Filipino memiliki akses-akses yang luas dalam bidang politik dan ekonomi di Mindanao maupun di Manila. Hal ini ditandai dengan besarnya keterwakilan etnis Kristen Filipino di Kongres, di mana dari 4 anggota kongres yang mewakili Mindanao, 3 orang di antaranya berasal dari kelompok Kristen Filipino. Kepemilikan tanah Kristen Filipino di Mindanao juga menempati posisi mayoritas, di mana lebih dari 70% tanah di Mindanao dimiliki oleh masyarakat Kristen Filipino yang tinggal di Mindanao atau elite Kristen Filipino yang tinggal di Luzon.<sup>60</sup>

Artikulasi politik kelompok Kristen Filipino juga terartikulasikan oleh kelembagaan gereja. Ada kecenderungan bahwa orientasi politik para pendeta di Mindanao sangat kuat. Gereja memiliki tanggung jawab politik untuk menyelamatkan kepentingan politik dan ekonomi dari masyarakat Kristen Filipino. Sehingga dalam kontestasi politik maupun konflik politik, gereja memiliki salah satu mesin politik yang sangat diperhitungkan di Mindanao. Para kandidat anggota kongres di Mindanao biasanya mempergunakan institusi gereja sebagai mesin politik untuk memenangkan pemilihan.

Kepentingan terbesar dari etnis Kristen Filipino dalam pusaran konflik di Mindanao adalah bagaimana mempertahankan dominasi sosial, ekonomi dan politik di Mindanao. Kelompok Kristen Filipino cenderung memandang bahwa konflik di Mindanao sebagai fenomena kriminalitas dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kelompok Kristen Filipino memandang bahwa segala bentuk

---

<sup>60</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme*. Hal. 68

perjanjian damai antara pemerintah Filipina dengan MNLF justru akan memperkuat posisi politik Bangsamoro di Mindanao. Menguatnya posisi politik Bangsamoro di Mindanao akan mengancam kepentingan politik dan ekonomi etnis Kristen Filipino. Kepentingan politik yang sangat dikhawatirkan adalah penggunaan kekuasaan politik Bangsamoro di pemerintahan otonomi akan dipergunakan oleh elite Bangsamoro untuk melakukan balas dendam politik terhadap etnis Kristen Filipino. Menguatnya politik Bangsamoro juga akan mengancam aset-aset ekonomi etnis Kristen Filipino, terutama kepemilikan tanah. Sebagaimana diketahui, MILF cenderung bersedia bernegosiasi dengan pemerintah Filipina jika negosiasi tersebut membahas tentang *Ancestral Domain*<sup>61</sup>.

#### **b. Konflik Ekonomi**

Pemerintah Manila membuat program pemukiman bagi orang Kristen dari Luzon dan Visayas di wilayah Bangsamoro berdasarkan UU No. 1888 dibentuklah *Commission On National Integration*. Program ini sebenarnya kelanjutan dari politik integrasi yang dilakukan Amerika. Pada waktu itu, masyarakat Bangsamoro tidak merasa terganggu, karena administrasi wilayah diatur oleh kalangan mereka sendiri. Tetapi dengan dukungan pemerintah, para pemukim Kristen mulai mengambil alih posisi strategis di bidang politik dan ekonomi, segera setelah mereka memenuhi tanah Bangsamoro. Kondisi ini mengakibatkan Muslim Bangsamoro semakin terpinggir. Padahal semula program ini bertujuan mendorong semangat berproduksi,

---

<sup>61</sup>Fokus membahas ancestral domain dalam perspektif MILF adalah bagaimana melakukan regulasi ulang terhadap status kepemilikan tanah di Mindanao dengan merujuk kepemilikan tanah sebelum tahun 1960.

pertanian, industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara-cara yang lebih modern. Tetapi tidak berdampak signifikan bagi masyarakat Bangsamoro.<sup>62</sup>

Dengan adanya kondisi semacam ini, tampaknya motivasi pemerintah Manila dalam proses migrasi dan pembangunan dinilai negatif, bukan hanya murni untuk pemerataan pemukiman di daerah Selatan, tujuan Pemerintah Filipina adalah untuk mengurangi dan menghancurkan peran orang Islam di sana.

Selain itu, kaum Bangsamoro merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak pernah mencapai daerahnya. Akhirnya, di kalangan Bangsamoro terjadilah apa yang disebut erosi identitas kultural, teralienasi dari pembangunan ekonomi, terasing dari wilayah kehidupannya sendiri. Mereka menjadi asing di egeri sendiri.<sup>63</sup>

Pada masa pemerintahan Marcos atau setelah penandatanganan perjanjian Tripologi, Bangsamoro diberikan hak otonom untuk mengelola wilayah Filipina Selatan. Bidang ekonomi dan finansial, wilayah Filipina Selatan mempunyai sistem tersendiri. Pada tahun 1977, keluar dekrit Presiden Filipina untuk mendeklarasikan adanya otonomi di wilayah Filipina Selatan dan tahun 1979 kembali dekrit Presiden dikeluarkan untuk mengimplementasikan adanya wilayah otonomi Filipina Selatan.<sup>64</sup>

Dengan kesepakatan itu, pihak MNLF diberikan hak otonomi untuk mengelola wilayah Filipina Selatan di bidang ekonomi dan finansial, misalnya

---

<sup>62</sup> Djunaedi Mahbub, *Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan*. (Jakarta: PT Al Ma'arif, 1975). Hal. 31

<sup>63</sup> *Demografi dan Sejarah Kolonisasi di Filipina*. Hal. 42

<sup>64</sup> Erni Budiwanti, *Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai*, (Jakarta: LIPI, 2001). Hal. 92

wilayah Filipina Selatan mempunyai sistem tersendiri. Tetapi perincian bagaimana mengoperasikan sistem itu dan bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat dan Manila tidak begitu jelas, sehingga masyarakat Filipina Selatan tidak bisa berharap banyak pada kesepakatan otonomi tersebut.

Awal bulan Agustus 1973, didirikanlah Bank Amanah Filipina untuk memenuhi beberapa tujuan untuk membangun kelas pengusaha wiraswasta Muslim yang lebih besar, untuk melatih kaum muda Islam memperoleh keahlian perbankan dan pengetahuan ekonomi yang canggih, dan membantu dana rehabilitasi daerah-daerah yang menyedihkan di daerah Selatan.

Pada tahun 1974 administrasi pembangunan Filipina Selatan (*SPDA/Southern Philippines Development Authority*) didirikan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Muslim dan Non-Muslim pada batas regional.<sup>65</sup>

Kenyataannya, banyak usaha pemerintah Filipina untuk mengeksploitasi hasil tambang atau sumber daya alam lainnya di wilayah Bangsamoro di Mindanao. Banyak usaha dari pemerintah Filipina untuk mengeksploitasi hasil tambang ini untuk keuntungan berbagai proyek industri tambang ini di Utara Filipina. Tingginya investasi untuk menggali sumber-sumber tambang di Mindanao ini semakin mempertinggi disparitas atau kesenjangan di antara minoritas Muslim Bangsamoro dan mayoritas Katolik. Setelah kemerdekaan Filipina, pemerintah bahkan menarik lebih banyak investor asing dari berbagai perusahaan multidimensional untuk

---

<sup>65</sup> Durorudin Masha, *Gerakan Resistensi Minoritas Muslim Filipina, Thailand, dan Myanmar*, (Jakarta: LIPI, 2004). Hal. 171

mendirikan industri-industri besar di Mindanao guna memenuhi harapan pemerintah akan peningkatan ekspor Filipina, namun tidak memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Muslim Bangsamoro di Mindanao.<sup>66</sup>

Adanya diskriminasi dalam hal pekerjaan terhadap masyarakat Bangsamoro berdampak negatif terhadap Muslim Bangsamoro karena kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan keterbatasan dalam hal memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.<sup>67</sup>

Pada umumnya, persoalan ketidakadilan ekonomi sebenarnya telah berlangsung lama di kalangan kelompok minoritas secara etnis ataupun agama. Diskriminasi tersebut didukung oleh beberapa hal, *pertama*, pada kenyataannya kelompok minoritas tinggal di wilayah terpisah dengan kelompok mayoritas; *kedua*, masih rendahnya fasilitas-fasilitas ekonomi yang mereka miliki; *ketiga*, pelemahan konflik budaya; *keempat*, diskriminasi yang dilakukan kelompok mayoritas.<sup>68</sup>

### **c. Konflik Politik**

Pada tahun 1972 Presiden Filipina di bawah pemerintah Ferdinand Marcos memberlakukan Undang-undang Darurat Militer, karena Filipina dihadapkan pada dua pemberontak, yakni pemberontak Muslim dan pemberontak Komunis yang disebut kelompok Hukbalahap. Sehingga Undang-undang Darurat Militer dikeluarkan sebagai jalan oleh Marcos untuk menghadapi kelompok pemberontak. Hal itu

---

<sup>66</sup>*Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara*. Hal. 138

<sup>67</sup>Wawancara dengan Anwar Bakri (masyarakat Mindanao Filipina Selatan) melalui telepon tanggal 8 Agustus 2014 pukul 20:00

<sup>68</sup>Tri Nuke Pujiastuti, *Problematika Muslim Filipina, Thailand, dan Myanmar*. (Jakarta: LIPI, 2003). Hal. 15

ditanggapi pemimpin *Moro National Liberation Front* (MNLF), Nur Misuari mengeluarkan manifesto pembentukan Bangsamoro pada tahun 1974.

Dalam manifesto tersebut dijelaskan secara eksplisit disebutkan bahwa MNLF beserta sayap militernya, Bangsamoro Army (Tentara Bangsamoro) didirikan sebagai alat perjuangan dalam merealisasikan cita-cita nasional Bangsamoro menuju Republik Bangsamoro.<sup>69</sup>

MNLF berhasil merebut kotamadya-kotamadya di Cotabato dan mendudukinya untuk sementara waktu. Seringnya terjadi serangan balik gerilyawan Islam memperlihatkan kemampuan MNLF dalam mengkoordinasi dan memperluas operasinya secara seksama.

Keberhasilan MNLF dalam membentuk sayap militer yang kuat ini tidak terlepas dari bantuan finansial dan material (termasuk persenjataan) dari berbagai Negara Muslim, khususnya dari Timur Tengah maupun dari organisasi Islam, terutama OIC (*Organization of Islamic Conference*). Pendukung utamanya adalah pemimpin Libya, Kolonel Muamar Khadafi yang mengeluarkan ribuan Poundsterling bagi perjuangan Muslim Filipina, bahkan melatih mereka dalam pelatihan militer.<sup>70</sup>

Perjuangan MNLF mendapat tanggapan dari OIC, sehingga pada tahun 1974 OIC mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah Filipina untuk mencari pemecahan konflik dan jalan damai. Dengan disebutkan MNLF dalam resolusi OIC menunjukkan keberhasilan MNLF dalam membuat terobosan diplomatik.

---

<sup>69</sup>*Gerakan Pembebasan Bangsamoro dan Perjanjian Damai*. Hal. 93

<sup>70</sup>Muslim Separatism. Hal. 77



Sebagai akibat dari tekanan ini, pemerintah Filipina pada akhirnya menghentikan serangan militernya. Langkah ini kemudian disusul dengan inisiatif pemerintah Filipina untuk mengadakan perundingan dengan MNLF. Di bulan Januari 1975 untuk pertama kalinya pemerintah Filipina duduk dalam meja perundingan dengan Nur Misuari sebagai pemimpin MNLF dan wakilnya, Hasim Salamat di Jeddah. Puncaknya adalah penandatanganan perjanjian Tripoli antara Manila dan para pemimpin MNLF pada tahun 1976.<sup>71</sup>

Dengan kejatuhan rezim Marcos pada tahun 1985, MNLF melakukan gencatan senjata dengan Presiden Corazon Aquino pada tahun 1986. Kemudian pada Januari 1987, MNLF menandatangani perjanjian usaha kemerdekaan bagi daerah-daerah Muslim dan menerima tawaran otonomi dari pemerintah. MILF yang merupakan pecahan dari MNLF menolak persetujuan itu. Pembicaraan antara Pemerintah Filipina dengan MNLF tentang otonomi wilayah terus berlanjut secara sporadis sepanjang tahun 1987, tetapi akhirnya mengalami jalan buntu.

Dari tahun 1975, di tubuh MNLF terjadi konflik internal karena perbedaan tuntutan yang akan diusung dalam perundingan di Jeddah dan dilanjutkan di Tripoli. Perpecahan MNLF dikarenakan munculnya perbedaan pendapat mengenai arah perjuangan Muslim Bangsamoro. Nur Misuari mewakili kelompok nasionalis sekuler, Hashim Salamat melebarkan gaya perjuangan dengan nasionalis Islam, serta kelompok Macapanto Abbas yang lebih kepada perjuangan di parlemen.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Bangsamoro, Societys and Culture*. Hal. 25

<sup>72</sup>*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Hal. 479

Dalam hal ini intelektual Bangsamoro yang berada di Jeddah menuduh Nur Misuari tidak memperjuangkan kepentingan ummat Islam. Ia ingin meluruskan perjuangan MNLF yang dianggapnya mengarah ke sekuler. Maka di bawah Salamat Hashim, mereka berusaha menguasai MNLF, tetapi mereka gagal. Mereka kemudian membentuk *Moro Islamic Liberation Front* yang lebih berorientasi kepada Islam Bangsamoro daripada Nasional Bangsamoro.<sup>73</sup>

MNLF yang tetap berada di bawah pimpinan Nur Misuari memindahkan markasnya ke Tripoli, Libya. Sementara itu Hashim Salamat yang keluar mendirikan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Kairo, dan kelompok ketiga Macapanton Abbas, bersama mantan anggota Kongres, Haroun al Rashid Lucman Abbas mendirikan organisasi *Bangsamoro Liberation Front* (BMLO) yang berkedudukan di Jeddah. Namun BLO tidak diperhitungkan, karena mereka bergabung dalam pemerintah Filipina.<sup>74</sup>

## **B. Respon Bangsamoro terhadap Pemerintah Filipina**

### **1. Sikap Bangsamoro**

Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan penyebab permasalahan masyarakat Bangsamoro. Diskriminasi dalam bidang pekerjaan dan sejumlah industri yang dikembangkan oleh pemerintah dan swasta. Misalnya, perusahaan baja nasional menyerap pekerja-pekerja non Muslim dari Luzon dan Visayas. Diskriminasi dan tekanan juga terlihat dari perubahan

---

<sup>73</sup> *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara*. Hal 109

<sup>74</sup> Muslim Separatism: *The Moros of Southern Philippines and Malays of Southern Thailand*, Hal. 73

pemakaian tanah-tanah Bangsamoro, banyaknya tanah-tanah Bangsamoro digunakan untuk pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Selatan dan Utara Filipina, seperti jalan raya, gedung perkantoran, daerah perdagangan, pembangkit listrik, dan kawasan industri lainnya. Penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat Bangsamoro seringkali dilakukan untuk kepentingan pembangunan. Contohnya terjadi penggusuran terhadap dua puluh dua keluarga miskin masyarakat Bangsamoro di General Santos untuk meratakan jalan bagi pembangunan konstruksi Departemen Perikanan Filipina.

Sebagai respon masyarakat Bangsamoro atas kebijakan pemerintah Filipina yang tidak menguntungkan mereka. Maka masyarakat Bangsamoro mendirikan gerakan-gerakan perlawanan untuk menuntut pemisahan dari negara Filipina dan membentuk negara sendiri.<sup>75</sup>

Berbagai macam bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Bangsamoro maupun pemerintah Filipina seperti halnya konflik bersenjata.

Konflik bersenjata menimbulkan dampak yang cukup besar bagi wilayah yang menjadi lokasi dari terjadinya konflik tersebut. Dampak yang ditimbulkan akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berada di wilayah konflik.

Konflik bersenjata yang terjadi antara Bangsamoro dengan pemerintah pusat Filipina menimbulkan banyak sekali dampak buruk. Dampak buruk yang ditimbulkan dari konflik ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>E-book. Riswanto. *Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina tahun 1968-1996* (Suatu Kajian Historis). Hal. 8

## 1. Pengungsian

Konflik bersenjata yang terjadi di Selatan Filipina pada 8 September 2013 yang lalu, cukup menimbulkan keresahan yang luar biasa pada masyarakat yang berada di daerah Zamboanga City dan sekitarnya. Akibat kontak senjata yang terjadi antara kelompok separatis Moro dengan kelompok militer Filipina, menyebabkan warga sipil harus mengungsi ke daerah yang lebih aman untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pada hari ketiga sejak gencatan senjata dimulai, yakni pada tanggal 12 September 2013, sekitar 13.000 warga kota melarikan diri dan berlindung di sebuah stadion olahraga yang terletak tiga kilometer dari daerah pertempuran.

Konflik bersenjata yang terjadi di Filipina Selatan sejak dahulu hingga sekarang menimbulkan traumatis tersendiri bagi masyarakat Filipina selatan, maka dari itu sebagian masyarakat pindah ke Malaysia mengungsi dan banyak diantaranya tidak kembali lagi ke Filipina dengan melihat konflik berkepanjangan yang tiada henti.<sup>76</sup>

Selain pada tahun tersebut, konflik bersenjata di Mindanao Filipina selatan mengalami frekuensi konflik yang tinggi pada tahun 1978.

Tingginya frekuensi konflik antara pemerintah pusat dengan kelompok bersenjata Moro di 1978 disebabkan oleh kekecewaan MNLF pada umumnya terhadap implementasi perjanjian *Tripoli Agreement* 1976. Presiden Marcos dituduh oleh Misuari melakukan pengingkaran janji-janji yang disampaikan ketika melakukan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Anwar Bakri (masyarakat Mindanao Filipina Selatan) melalui telepon tanggal 8 Agustus 2014 pukul 20:00

negoisasi *Tripoli Agreement* 1976. Kekecewaan Misuari terkait dengan kebijakan Presiden Marcos untuk mengonfirmasi ulang posisi politik dari wilayah otonomi Moro yang meliputi 13 daerah Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North Cotabato, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato, Palawan, serta semua kota dan desa yang berada di wilayah tersebut melalui plebisit. Sedangkan dalam pemaknaan Misuari, posisi ke 13 wilayah tersebut merupakan posisi yang definitif dan tidak perlu dikonfirmasi ulang.

Nur Misuari juga kecewa dengan pemerintah Marcos yang tidak merealisasikan untuk melakukan pengakuan terhadap hak khusus pemerintah otonomi Mindanao otonomi untuk mendirikan pengadilan Syari'ah, sekolah, sistem administrasi, sistem ekonomi dan keuangan, keamanan kawasan (*Special Regional Security Force*), badan perwakilan dan dewan eksekutif, integrasi kombatan MNLF ke dalam *Armed Forces of the Philippines*, dan Kepolisian, keterwakilan daerah otonom dalam pemerintah pusat, serta persentase yang proporsional berkaitan dengan pendapatan dari sektor pertambangan dan mineral sebagai pendapatan untuk daerah otonom.

Periode 1980-2000, konflik Mindanao menunjukkan kompleksitas yang berarti yang ditandai dengan konflik horizontal terutama di komunitas Bangsamoro dan konflik horizontal antara kelompok politik Bangsamoro dengan Kristen Filipino. Konflik horizontal antara faksi perlawanan Bangsamoro, terjadi sebagai akibat kekecewaan faksi MNLF terhadap kebijakan Nur Misuari dalam proses perundangan

damai pada *Tripoli Agreement* 1976. Dua faksi perlawanan Bangsamoro yang kemudian sering terlibat konflik horizontal dengan MNLF adalah MILF yang dikepalai oleh Salamat Hashim di Maguindanao.

Pada periode ini, frekuensi konflik horizontal antara komunitas Bangsamoro dengan komunitas Kristen Filipino relative tidak mengalami eskalasi bahkan cenderung mengalami deeskalasi. Salah satu faktor penting yang menyebabkan frekuensi konflik berbasis primordial mengalami penurunan adalah menurunnya peran lembaga dan fatwa keagamaan dalam mengartikulasikan konflik dalam bentuk perang. Lembaga keagamaan di Mindanao pada periode konflik 1946-1970 yang sering berperan sebagai kelompok “Elang” pada periode konflik 1980-2000 cenderung berperan sebagai kelompok “Merpati”.<sup>77</sup>

Merujuk studi yang dilakukan *Journal of Peace Research*, periode 1980-2000 sebagai periode konflik yang paling fluktuatif di mana dalam kurun waktu 1982-1990, konflik Mindanao mengalami deeskalasi, namun di periode 1996-1999 konflik mengalami eskalasi yang intensif. Turunnya intensitas konflik antara pusat dan daerah di periode ini terkait 1982-1990 terkait dengan menurunnya kapasitas militer dari MNLF terkait dengan menurunnya jumlah kombatan MNLF dari 21.000 personil di 1977 menjadi hanya 14.000 di tahun 1982 maupun menurunnya dukungan

---

<sup>77</sup> Lihat studi peran lembaga keagamaan dalam konflik di Mindanao pada Thomas McKeena, *Muslim Rules and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*, (Manila: Anvil Publishing Inc, 1998) atau dalam Casino, Eric S., *Interethnic Conflict in the Philippine Archipelago*”, in Jerry Boucher, Dan Landis, dan Karen Arnold Clark, eds, *Ethnic Conflict: International Perspectives*, (London: Sage Publications, 1987).Hal. 248.

Organisasi Koferensi Islam terkait kinerja MNLF dalam merepresentasikan kepentingan Bangsamoro.<sup>78</sup>

Meningkatnya konflik di 1996-1999 terkait dengan artikulatifnya kelompok MILF dan Abu Sayyaf dalam upaya menggagalkan upaya negoisasi damai antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Dalam pandangan MILF maupun Abu Sayyaf Group, negoisasi dalam *Final Peace Agreement* 1996 justru akan mempersulit proses pembentukan Negara Bangsamoro Merdeka. Meningkatnya konflik di Mindanao 1997-1998, terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah Filipina yang pada era Ramos mengembangkan strategi *all-out peace* ke kebijakan *all-out war* yang dipilih oleh Joseph Erick Estrada. Estrada melakukan serangan yang sistematis ke *camp-camp* pelatihan militer MILF maupun ke wilayah SZOPAD untuk menumpas gerakan perlawanan Bangsamoro.

## **2. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Bangsamoro**

Pihak-pihak dalam konflik Mindanao terdiri dari beberapa aktor konflik yang bersifat permanen dan beberapa di antaranya merupakan aktor konflik yang baru muncul setelah periode perjanjian antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao. Pada pembahasan ini akan dipaparkan aktor yang terlibat dalam konflik Mindanao yang diklasifikasikan dalam 4 kelompok besar, yakni kelompok Bangsamoro, kelompok Kristen Filipino, kelompok Lumads, dan pemerintah Filipina.

1. Kelompok perwakilan Bangsamoro yang terdiri dari:

---

<sup>78</sup> Nagasura T Madale. *The Future of the Moro National Liberation Front (MNLF) As A Separatist Movement in Southren Philippines*. In Lim Joo-Jock and Vani S., ed., *Armed Separatism in Southeast Asia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1984). Hal. 185

### 1.1.MIM (Mindanao Independent Movement)

Gerakan masyarakat Bangsamoro pertama kali didirikan di Filipina Selatan khususnya wilayah Mindanao dan Sulu yaitu MIM (*Muslim Independent Movement*) yang kemudian berubah nama menjadi *Mindanao Independent Movement*. Gerakan MIM ini didirikan oleh Datu Udtog Matalam pada tanggal 1 Mei 1968. Tujuan dari berdiri organisasi MIM adalah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bagi Mindanao dan Sulu<sup>79</sup>.

Latar belakang berdirinya Mindanao Independent Movement (MIM) di tahun 1968 tidak terlepas dari peristiwa pembantaian Jabidah pada 18 Maret 1968, pada masa presiden Ferdinand Marcos. Tragedi Jabidah merupakan titik awal lahirnya gerakan kemerdekaan bagi masyarakat Bangsamoro, yang kemudian diikuti oleh organisasi *Moro National Liberation Front* (MNLF), dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF)

### 1. 2. MNLF (Moro National Liberation Front)

*Moro National Liberation Front* / Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) adalah suatu organisasi perjuangan radikal yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi Muslim Bangsamoro yang berada di Filipina Selatan. Proses berdirinya MNLF menjadi organisasi perjuangan Bangsamoro tidak terlepas dari berbagai bentuk diskriminasi rakyat Bangsamoro terlebih akibat dari Pembantaian Jabidah.

MNLF merekrut para anggotanya dari beberapa kelompok etnis seperti etnis Tausug, Samal dan Yakan. Anggota pertamanya terdiri dari golongan pemuda yang

---

<sup>79</sup> Cesar Adib Majul, 1989. Hal 43.



berlatar belakang dari pendidikan sekuler, pemuda tersebut mendapat pelatihan militer di Malaysia. Seperti Nur Misuari, pemimpin MNLF, anak-anak muda ini pada umumnya berlatar belakang pendidikan sekuler, dan beberapa orang diantaranya pernah terlibat dalam gerakan politik mahasiswa beraliran kiri.<sup>80</sup>

MNLF didirikan, tujuannya adalah untuk menciptakan independensi kampung halaman Muslim Bangsamoro. Namun, di bawah tekanan negara-negara Islam, MNLF telah menerima opsi otonomi dalam negara Filipina. Para pemimpin MNLF sekarang ini bekerja dalam pemerintahan wilayah otonom Muslim Mindanao.

Gerakan MNLF mendapatkan berbagai dukungan dan bantuan baik berbentuk finansial maupun material dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Seperti pemimpin Libya kolonel Muammar Khadaffy, dan dari organisasi Islam OIC (*Organisation of Islamic Conference*) / Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sejak tahun 1972 OKI sering membicarakan permasalahan Muslim Filipina Selatan, bahkan dijadikan OKI sebagai agenda tahunan dengan Negara-negara anggota. OKI mendesak pemerintah Filipina yang pada waktu itu pada masa pemerintahannya Marcos guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muslim Bangsamoro.

Namun, pada tahun 1977 dan 1978 dibalik dukungan itu gerakan MNLF mengalami masa-masa kesulitan. MNLF sebagai induk perjuangan Bangsamoro akhirnya terpecah. *Moro National Liberation Front* (MNLF) dipimpin oleh Nur Misuari dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dipimpin oleh Salamat Hashim.

### 1. 3. MILF (Moro Islamic Liberation Front)

---

<sup>80</sup> John Gershman. Moeflich Hasbullah. 2003. Hal. 241

Lahirnya gerakan *Moro Islamic Liberation Front*(MILF) tidak terlepas dari konflik intern yang pernah dialami MNLF. Faksi Selamat Hashim melihat perjuangan MNLF dirasakan kurang memenuhi aspirasi masyarakat Bangsamoro di Filipina Selatan, sebab MNLF telah mengadakan negosiasi damai dengan pemerintah Filipina, hal ini dirasa oleh faksi Selamat Hashim telah keluar dari tujuan utama dibentuknya MNLF yaitu, untuk mendirikan negara terpisah dari Filipina.

Konsep-konsep jihad yang pada awalnya dibentuk oleh Selamat Hashim dengan Prof. Nur Misuari tentang bentuk sistem pemerintahan Islam, akan tetapi dalam perjalanan gerakan MNLF mengalami kemunduran dan melemahnya konsep-konsep jihad yang sudah dibentuk. Karena banyak tawaran yang diterima oleh Prof. Nur Misuari dari pemerintah Filipina, walaupun dari segi *zhahir* tawaran tersebut menguntungkan orang-orang masyarakat Bangsamoro. Maka dari itu, Selamat Hashim memutuskan untuk memisahkan diri dari gerakan MNLF dan membentuk gerakan Islam yang dinamakan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).<sup>81</sup>

*Moro Islamic Liberation Front* atau Front Pembebasan Islam Moro (MILF) adalah gerakan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Bangsamoro yang bertujuan untuk membebaskan Islam, gerakan tersebut sangat berpengaruh di bagian Filipina Selatan terutama di kawasan Mindanao dan pulau-pulau lainnya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Abu Ibrahim Muhammad Daud. 2008,.Hal. 112

<sup>82</sup> Abu Ibrahim Muhammad Daud. 2008. Hal. 69

*Moro Islamic Liberation Front* (MILF) secara resmi didirikan tahun 1984, berawal dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh anggota Komite Sentral yaitu Salamat Hashim yang keluar dari MNLF tak lama setelah gagalnya Perjanjian Tripoli tahun 1977. MILF mulanya disebut MNLF-New, kemudian tahun 1984 secara formal berganti menjadi MILF. MILF lebih menekankan pada persoalan-persoalan Islam, dan kebanyakan pemimpinnya adalah para sarjana Islam yang berlatar belakang agama dan aristokrat tradisional. MILF mengakui memiliki 120.000 para pejuang bersenjata dan tak bersenjata serta sejumlah besar simpatisan. Kebanyakan anggotanya berasal dari Manguindanao dan kelompok etnis Iranun, serta sebagian kecil dari etnis.

## 2. Kristen Filipino

Penduduk Kristen Filipino di Mindanao sebelum memasuki tahun 1970 hanyalah 20% dari penduduk Mindanao. Mereka kebanyakan dari masyarakat Luzon yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang dikembangkan oleh Spanyol maupun Amerika Serikat, ataupun para misionaris yang dikirim oleh pemerintah kolonial Spanyol dan Amerika Serikat untuk mengajarkan ajaran Kristen sebagai salah satu cara membangun tertib sipil di Mindanao.

Kebijakan politik migrasi yang dirilis presiden Manuel Quezon, maupun Marcos pada 1970 telah mampu mengubah peta demografi Mindanao. Jumlah penduduk yang beragama Kristen melonjak sampai 80% penduduk di Mindanao dan menjadi kelompok politik mayoritas. Sebagai kelompok politik mayoritas, Kristen Filipino memiliki akses-akses yang luas dalam bidang politik dan ekonomi di

Mindanao maupun di Manila. Hal ini ditandai dengan besarnya keterwakilan etnis Kristen Filipino di kongres, di mana dari 4 anggota kongres yang mewakili Mindanao, 3 diantaranya berasal dari kelompok Kristen Filipino. Kepemilikan tanah Kristen Filipino di Mindanao juga menempati posisi mayoritas, di mana lebih dari 70% tanah di Mindanao dimiliki oleh masyarakat Kristen Filipino yang tinggal di Mindanao atau elit Kristen Filipino yang tinggal di Luzon.

Artikulasi politik kelompok Kristen Filipino juga terartikulasikan oleh kelembagaan gereja. Ada kecenderungan bahwa orientasi politik para pendeta di Mindanao sangat kuat. Gereja memiliki tanggung jawab politik untuk menyelamatkan kepentingan politik dan ekonomi dari masyarakat Kristen Filipino. Sehingga dalam kontestasi politik maupun konflik politik, gereja menjadi salah satu mesin politik yang sangat diperhitungkan di Mindanao. Para kandidat anggota kongres di Mindanao biasanya mempergunakan institusi gereja sebagai mesin politik untuk memenangkan pemilihan.<sup>83</sup>

Kepentingan terbesar dari etnis Kristen Filipino dalam pusaran konflik di Mindanao adalah bagaimana mempertahankan dominasi sosial, ekonomi, dan politik di Mindanao. Kelompok Kristen Filipino cenderung memandang bahwa konflik di Mindanao sebagai fenomena kriminalitas dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan bukan konflik politik. Solusi terhadap konflik di Mindanao adalah pendekatan hukum dan mengizinkan penggunaan kekerasan untuk memerangi kelompok perlawanan. Kelompok Kristen Filipino memandang solusi politik melalui

---

<sup>83</sup>Suwandono. *Managemen Konflik Separatisme*. Hal. 68

negosiasi terhadap kelompok Bangsamoro merupakan pilihan politik yang sangat membahayakan, baik bagi kepentingan etnis Kristen Filipino di Mindanao maupun kepentingan nasional Filipina.

Kelompok Kristen Filipino memandang bahwa segala bentuk perjanjian damai antara pemerintah Filipina dengan MNLF, justru akan memperkuat posisi politik Bangsamoro di Mindanao. Menguatnya posisi politik Bangsamoro di Mindanao akan mengancam kepentingan politik dan ekonomi etnis Kristen Filipino. Kepentingan politik yang sangat dikhawatirkan adalah penggunaan kekuasaan politik Bangsamoro di pemerintahan otonomi akan dipergunakan oleh elit Bangsamoro untuk melakukan balas dendam politik terhadap etnis Kristen Filipino. Menguatnya posisi politik Bangsamoro juga akan mengancam aset-aset ekonomi Kristen Filipino, terutama kepemilikan tanah. Sebagaimana diketahui, MILF cenderung bersedia bernegosiasi dengan pemerintah Filipina jika negosiasi tersebut membahas tentang Ancestral Domain. Fokus pembahasan Ancestral domain dalam perspektif MILF adalah bagaimana melakukan regulasi ulang terhadap status kepemilikan tanah di Mindanao dengan merujuk kepemilikan tanah.<sup>84</sup>

### 3. Lumads

*Lumads* merupakan masyarakat asli Mindanao yang menetap memegang teguh tradisi dan kebiasaan hidup nenek-moyangnya meskipun telah bersentuhan tradisi baru, baik tradisi Katolik-Spanyol ataupun tradisi Islam. Dalam keberagaman, masyarakat Lumads memegang teguh tradisi lama dalam keberagaman di mana

---

<sup>84</sup>Suwandono. *Managemen Konflik Separatisme*. Hal. 69

masih mengembangkan tradisi paganisme, yakni meyakini bahwa terdapat kekuatan supra-natural dalam benda-benda tertentu.

Penduduk Lumads cenderung tinggal di daerah terpencil dan pegunungan. Pilihan lokasi ini disamping sebagai pilihan rasional untuk menghindari banjir di Mindanao juga sebagai akibat termarginalnya akses kepemilikan tanah. Jumlah penduduk Lumads hanya sekitar 4% dari total jumlah penduduk Mindanao. Dalam konteks politik dan ekonomi di Mindanao, etnis Lumads cenderung sebagai kelompok minoritas yang berimplikasi kepada sering terabaikannya kepentingan politik dan ekonominya. Karena kondisi inilah sejumlah lembaga swadaya masyarakat melakukan advokasi politik dan sosial, agar hak-hak masyarakat Lumads sebagai *indigenous people* dihormati dan dijamin oleh undang-undang.<sup>85</sup>

Orientasi politik masyarakat Lumads cenderung bersifat parokial, di mana artikulasi kepentingan masyarakat Lumads sangat ditentukan oleh pilihan politik dari masyarakat secara umum. Terkadang masyarakat Lumads sangat dipengaruhi oleh pilihan politik masyarakat Bangsamoro, kadang dipengaruhi pilihan politik masyarakat Kristen Filipino, atau bahkan kadang dipengaruhi oleh pilihan politik kelompok komunis di Mindanao.

Dalam konteks konflik di Mindanao, masyarakat Lumads cenderung bukan menjadi pemain utama. Masyarakat Lumads berada dalam tarik-menarik kekuatan Bangsamoro dan kekuatan Kristen Filipino. Pada 1970, masyarakat Lumads cenderung bersama di mobilisasi oleh kekuatan Kristen Filipino untuk memusuhi

---

<sup>85</sup>Suwandono. *Managemen Konflik Separatisme*. Hal. 70

kelompok politik Bangsamoro. Namun, pada 1980-1990, masyarakat Lumads dikelolah oleh Misuari untuk menjadi bagian dari komunitas Mindanao, untuk menuntut kebijakan pemerintah Filipina agar memerhatikan kesejahteraan masyarakat Mindanao.

#### 4. Pemerintah Filipina

Kepentingan terbesar dari setiap rezim di Filipina dalam konteks konflik Mindanao adalah bagaimana mempertahankan wilayah Mindanao sebagai wilayah politik dan administratif dari Filipina. Dalam upaya mempertahankan wilayah, rezim di Filipina memiliki dua strategi besar, yakni dengan strategi konfrontasi terhadap kelompok pemberontak maupun melakukan strategi politik berupa perjanjian damai ataupun referendum untuk penentuan pilihan politik masyarakat Mindanao.

Rezim Marcos yang berkuasa semenjak 1970 cenderung menerapkan kebijakan represif kepada setiap bentuk perlawanan masyarakat Mindanao kepada pemerintah, baik yang dilakukan oleh kelompok Mindanao muslim ataupun kelompok komunis. Kebijakan represif ini tercerminkan dalam kebijakan *Martial Law*, sebuah kebijakan yang memberikan ruang yang besar bagi tentara Filipina dan penduduk Katolik melakukan tindakan kekerasan kepada komunitas muslim. Meskipun demikian, pada akhirnya rezim Marcos pada 1976 juga mulai menunjukkan sikap akomodatifnya terhadap gerakan perlawanan Bangsamoro. Sikap akomodatif rezim Marcos tidak bisa dilepaskan dari tekanan masyarakat internasional dan dunia Islam terhadap kebijakan represifnya.

Rezim Aquino yang menggantikan rezim Marcos di 1992 cenderung mengembangkan kebijakan akomodatif terhadap kelompok perlawanan Mindanao daripada kebijakan represif. Pilihan kebijakan ini tidak bias dilepaskan dari spektrum politik di Filipina dan dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik Mindanao di meja perundingan. Langkah-langkah yang dilakukan Aquino adalah dengan melakukan pertemuan informal dan formal dengan elit-elit MNLF dan beberapa Negara Timur Tengah sebagai fasilitator negosiasi.

Rezim Fidel Ramos sebagai penerus rezim Aquino cenderung untuk meneruskan gaya kepemimpinan Aquino untuk bersikap akomodatif terhadap kelompok perlawanan di Mindanao. Sebagai mantan wakil presiden pada rezim Aquino, Ramos telah merintis jalan perdamaian dengan kelompok perlawanan. Sikap *pro peace* rezim Ramos, membuat MNLF yang sebelumnya memilih sikap konfrontatif pasca Tripoli Agreement 1976, mulai menunjukkan sikap akomodatif dan menerima tawaran negosiasi dalam konteks *Final Peace Agreement* 1996.

Berbeda dengan rezim Aquino dan Ramos yang cenderung mengembangkan kebijakan akomodatif atau *all-out peace* terhadap kelompok perlawanan Bangsamoro. Rezim Estrada cenderung memilih kebijakan represif (*all-out wars*). Kebijakan Estrada keras ia melakukan penyerangan langsung dan menghancurkan *camp-camp* serta markas MILF, Abu Sayyaf dan MNLF yang dianggap sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas, demikian pula halnya yang telah dikemukakan oleh Nasir Badu selaku peneliti konflik Internasional “Kasus konflik Bangsamoro memperlihatkan bahwa Negara adalah bagian dari aktor yang berkonflik yang tidak



bisa diandalkan untuk menyelesaikan konflik. Cara koersif yang ditempuh Filipina untuk membunuh MILF/MNLF di beberapa kasus membuktikan hal tersebut”.<sup>86</sup>

Sikap represif Estrada cenderung juga dilanjutkan oleh Arroyo dalam menyelesaikan konflik Mindanao, untuk mendukung kebijakan tersebut rezim Arroyo mengembangkan kembali kebijakan kerja sama militer dengan Amerika Serikat terutama kerja sama perang terhadap jaringan terorisme internasional.

### **C. Resolusi konflik melalui mediasi dan negosiasi**

Konflik yang terjadi antara pemerintah pusat Filipina dengan separatis Bangsamoro yang terjadi sejak tahun 1972 telah menarik perhatian dunia internasional, terlebih bagi Negara-negara yang menjadi peserta Organisasi Konferensi Islam (OKI). Salah satu alasan dari ketertarikan mereka terhadap konflik ini ialah bahwa konflik terjadi dikarenakan ketidakpahaman pemerintah pusat Filipina mengenai Islam dan Bangsamoro.

Indonesia yang pernah ditunjuk sebagai mediator dari konflik ini, sejauh mungkin harus mampu memaklumi hal-hal yang sebenarnya terjadi.

Masalah yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Bangsamoro dianggap sebagai suatu masalah internal oleh Filipina, dikarenakan sifatnya merupakan konflik internal maka pemerintah Filipina memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan konflik tersebut dalam kerangka kedaulatan nasional

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Muhammad Nasir Badu selaku peneliti konflik Internasional Universitas Hasanuddin melalui chat Facebook pada tanggal 7 September 2014.

dan ketentuan wilayah Filipina. Berbagai penyelesaian dengan cara damai, adil, dan terhormat telah ditempuh pemerintah Filipina untuk mengakhiri konflik dengan Bangsamoro. Perundingan juga dilakukan secara langsung dan menggunakan jasa-jasa baik dari Organisasi Konferensi Islam.

Perundingan dan Persetujuan dengan MNLF:<sup>87</sup>

1. Kairo, Januari 1975. Pertemuan Panel Pemerintah yang terdiri dari para Duta Besar Lininding Pangandaman dan Duta Besar Paufico A. Castro, dengan wakil-wakil MNLF Hasim Selamat, Balindung, dan Hasami.
2. Jedah, Tripoli, Kairo, Riyadh, Januari 1975. Pertemuan Panel Pemerintah yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif Alejandro Meleliar, Laksana Romulo Espeldon, Duta Besar Lininding Pangandaman, Duta Besar Paufico A. Castro, Kanselir Ruben Cuyugan, Dekan Cesar Mojul, Kol. Jose Almonte, Ahli Ekonomi, dan wakil-wakil MNLF Nur Misuari, Hashim Selamat, AbdulBaki dan Hasami.
3. Tripoli, November 1976. Pertemuan dengan Ibu Negara Filipina Ny. ImeldaRomueldez Marcos dan Pemimpin Libya Qadhafi.
4. Tripoli, Desember 1976. Pertemuan Panel Pemerintah yang terdiri dari Menteri Muda Pertahanan Carmulo Barkero, Duta Besar Lininding Pangandaman, Komisaris Simon Datumanoeng, SPDA Administrator Karim Sidri, Duta Besar Pasifico A. Castro dan Kolonel Eduardo Ermita Nur Misuari, Hashim Selamat, Abdul Baki dan Hasami. Perundingan ini melahirkan Persetujuan Tripoli 23 Desember 1976.

---

<sup>87</sup> Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, (LP3ES. Jakarta, 1989).Hal. 160-162.

5. Zamboanga City, Januari 1977. Perundingan ini dihadiri oleh Laksamana Romulo Espaldon dan Panglima MNLF Tham Manjaorsa. Perundingan ini melahirkan persetujuan II yaitu Persetujuan Gencatan Senjata 20 Januari 1977.
6. Tripoli, Februari-Maret 1977. Antara Panel Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Muda Pertahanan Carmelo Barbero, Duta Besar Pasifico A. Castro, Jenderal Pacienco Magtibay, DLGCD Assistant Secretary Ronaldo Puno dan Penasehat Kementerian Kehakiman Minerva Reyes dan MNLF yang diwakili oleh Nur Misuari, Hashim Salamat, Abdul Baki, Gubernur Candao dan Pengacara Balindong.
7. Tripoli, Banghari, Maret 1977. Pertemuan-pertemuan antara Ibu Negara Filipina Madame Imelda Romaldez Marcos dan pemimpin Libya Kolonel Muammar Al Qadhafi .
8. Manila, April 1977. Pertemuan Panel Pemerintah yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Carlos P. Romulo, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, Menteri Kehakiman Jose Abad Santos, Menteri Urusan Pemerintah Daerah Jose Rono, Menteri Muda Pertahanan Carmelo Barbero, Duta Besar Pasifico A. Castro, Duta Besar Lininding Pangandaman, Laksamana Romulo Espaldon, Mayor Jenderal Fidel Ramos dengan wakil MNLF Kagim Jujuriadan Komite Menteri Empat Negara (Menteri Luar Negeri Libya, Ali Treki, Direktur Politik dan Direktur Darman dari Somalia).

9. Kairo, Maret 1979. Pertemuan Panel Pemerintah yang terdiri dari para Duta Besar Lininding Pangandaman, Pasifico A. Castro dan Felino Menez dengan wakil-wakil MNLF Hashim Salamat, Balindung dan Hasami.
10. Kairo, April 1979. Pertemuan Panel Pemerintah yang terdiri dari Duta Besar Lininding Pangandaman, Abdul Khayer Alonto dan Dr. Loong dengan pihak dari MNLF yang diwakili oleh Hashim Salamat Candao dan Balindong. Inti dari kesepuluh pertemuan diatas adalah Persetujuan Tripoli 1976 yang berisikan tentang perubahan-perubahan yang mendasar antara kedua pihak yang berkonflik serta upaya untuk menterjemahkan persetujuan tersebut dalam satu konsep sehingga memberikan suatu visi yang sama beserta penerapannya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi permasalahan terhadap perundingan setelah persetujuan Tripoli 1976 tersebut terlaksana. Persetujuan Tripoli tidak begitu saja terlaksana tanpa ada hambatan. Hambatan berasal dari proses sosialisasi persetujuan tersebut karena beratnya tuntutan dari gerakan separatis MNLF terhadap pemerintah Filipina<sup>88</sup>. Selain itu, hambatan juga berasal dari dinamika politik yang ada di Filipina. Setelah masa pemerintahan Presiden Marcos, Filipina dipimpin oleh Corazon Aquino. Pada masa kepemimpinannya, perjanjian Tripoli sudah berhasil dicapai. Namun sayangnya, sistem pemerintahan Corazon Aquino sangat berbeda jauh dengan pemimpin sebelumnya. Presiden Corazon Aquino secara tegas menyatakan keberatannya terhadap keinginan bangsa Moro yang ingin

---

<sup>88</sup> Gandi SURIANTI Siregar, dimuat dalam Skripsi “*Peranan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Separatis MNLF Dengan Pemerintah Pusat Filipina Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal. 51

melepaskan diri dari Filipina. Hal ini secara tidak langsung menjadi suatu isyarat bahwa masalah kaum separatis Moro masih akan menjadi masalah politik yang sangat rancu di Filipina.<sup>89</sup> Tahun 1992, Corazon Aquino digantikan oleh Fidel Ramos. Presiden Fidel Ramos memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan konflik antara Filipina dengan gerakan separatis Moro. Setelah 16 tahun sejak diselenggarakannya Perjanjian Tripoli 1976, Indonesia ditunjuk oleh pemerintah Filipina sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan perundingan. Perundingan tersebut dilaksanakan di Jakarta. Perundingan yang terjadi di Jakarta pada saat itu hanya melanjutkan hal-hal yang belum disepakati dalam Perjanjian Tripoli. Perundingan yang dilaksanakan di Jakarta diharapkan menjadi peluang terakhir bagi kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian. Upaya perundingan dan persetujuan antara pemerintah pusat Filipina dengan gerakan separatis MNLF yang dicapai pada saat masa kepemimpinan Presiden Corazon Aquino dan Presiden Fidel Ramos yang diadakan di Indonesia, antara lain:<sup>90</sup>

1. Bogor, April 1992 pertemuan ini membahas mengenai agenda acara perundingan dilanjutkan kemudian di Jakarta.
2. Jakarta, Oktober dan November 1993, mengadakan pembicaraan tentang teknis pemberian otonomi bangsa Moro. Perundingan ini pada akhirnya hanya menghasilkan rancangan pertemuan berikutnya.

---

<sup>89</sup> Syahbuddin Pangandaralam, *Mengenal Dari Dekat Filipina*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) Hal. 45-46.

<sup>90</sup> Gandhi Suriati Siregar. Hal. 52-53.

3. Jakarta, September 1994, kedua belah pihak mengemukakan penafsirannya tentang pelaksanaan otonomi, dimana pemerintah Filipina mengizinkan lewat jalur hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1973 Filipina yaitu diadakannya Referendum di wilayah yang termasuk dalam Persetujuan Tripoli, sedangkan MNLF menginginkan pemberian otonom berdasarkan Perjanjian Tripoli 1976.

Selanjutnya pada tahun 1996, kembali diadakan suatu perjanjian antara pemerintah Filipina dengan gerakan separatis MNLF. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada 2 September 1996 dibawah pimpinan Fidel V. Ramos. Perjanjian damai yang dikenal dengan "*Final Peace Agreement*" (FPA), telah berhasil mengawali terbentuknya proses rekonsiliasi terhadap MNLF saja dan tidak termasuk komunitas MILF. Hal ini hanya membawa keuntungan bagi MNLF sebagai pihak yang turut dalam pelaksanaan perjanjian, adapun MILF menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah Filipina.<sup>91</sup>

Penandatanganan FPA memang telah dilaksanakan dan keadaan setelah penandatanganan FPA merupakan suatu proses damai yang disebut dengan tahapan *peacemaking*. Kondisi *peacemaking* berfokus antara kedua belah pihak pada kesepakatan untuk menghentikan peperangan. Dengan perjanjian tersebut berarti konflik itu harus dihentikan dan secara tidak langsung terdapat tanggung jawab bersama untuk menjaga perjanjian tersebut baik dari pemerintah maupun MNLF.

---

<sup>91</sup> Rufa Cagoco-Guiam. *Mindanao: Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace*. Dalam buku *Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities*. (United States: Lynne Rienner Publisher, inc. 2004). Hal. 487

Sehingga, apabila perdamaian sudah terwujud maka perdamaian tersebut harus dijaga, ini akan berlangsung ketahap perdamaian selanjutnya. Setelah masa kepemimpinan Presiden Fidel Ramos, Filipina dipimpin oleh Presiden Estrada. Presiden Estrada menyatakan "*all out war*" antara pasukan militer pemerintah Filipina dengan MILF. Presiden Estrada tidak mengindahkan hal-hal yang telah diatur dalam akan perjanjian FPA. Sehingga yang terjadi adalah kegagalan resolusi konflik melalui negosiasi FPA tersebut. Hal ini bertentangan dengan ekspektasi para pihak yang mengharapkan tidak terjadi lagi suatu tindakan kekerasan. Resolusi terhadap konflik ini hanya menghasilkan kegagalan antara pemerintah Filipina dengan MILF, sehingga terjadi suatu eskalasi konflik yang kembali terjadi. Sebaliknya, proses rekonsiliasi antara pemerintah dengan MNLF dapat dikatakan berhasil sebab pemerintah hanya akan melakukan penyerangan terhadap kelompok separatis MILF dan kelompok separatis lainnya. Sejarah berbicara bahwa pemerintah Filipina enggan untuk melakukan suatu perundingan dengan MILF dikarenakan pemerintah memiliki pandangan bahwa MILF merupakan gerakan islam yang banyak melakukan aksi-aksi terorisme. Rasa diskriminasi yang dimiliki oleh MILF karena tindakan pemerintah Filipina yang tidak pernah melibatkan mereka dalam setiap perundingan menyebabkan MILF melakukan aksi separatisme di Filipina Selatan. Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan cita-cita mereka, yakni melepaskan diri dari pemerintah pusat Filipina. Melihat hal ini, pemerintah Filipina berupaya melaksanakan perdamaian dengan kelompok MILF untuk meminimalisir aksi-aksi kekerasan yang dilakukan

oleh MILF. Tindakan pemerintah Filipina yang berkeinginan melakukan perundingan damai dengan MILF mendapat tantangan dari kelompok separatis lainnya, yakni kelompok MNLF. Pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF),

Nur Misuari, mengatakan pakta dengan MILF itu ilegal karena melanggar kesepakatan lain yang diakui oleh PBB.<sup>92</sup>

Presiden Benigno Aquino, yang memenangkan pemilu di tahun 2010, menyebutkan bahwa pembentukan kawasan Muslim itu suatu percobaan gagal. Benigno Aquino lebih mengandalkan pada persetujuan baru untuk membawa perdamaian dan mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan. Misuari berpendapat sebaliknya, bahwa perjanjian perdamaian dengan MILF itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan bahkan akan menjerumuskan lagi pulau Mindanao dalam perang. Dalam perkembangan lain, pemerintah Filipina berharap keberhasilan kesepakatan damai dengan MILF tersebut mampu mendorong dimulainya lagi perundingan perdamaian dengan kaum pemberontak komunis yang lain. Pemerintah Filipina mulai melaksanakan perundingan dengan kelompok MILF. Perundingan-perundingan yang terakhir dilaksanakan pada Agustus 2013 yang lalu di Malaysia. Presiden Benigno Aquino mengatakan bahwa perundingan yang terjadi dengan MILF sebenarnya bukan untuk menciptakan

---

<sup>92</sup> “Perjanjian perdamaian pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menghadapi tantangan hukum dari kelompok pemberontak Moro lain”, sebagaimana dimuat dalam <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-10-10/perjanjian-damai-filipinamilf-hadapi-ancaman/1028140>, diakses pada tanggal 21 Juni 2014



suatu perjanjian damai, tetapi membahas kerangka kerja damai dengan MILF.<sup>93</sup> Kerangka kerja damai ini merupakan suatu awal proses menuju persetujuan perdamaian. Pertemuan yang digelar di Malaysia membahas kerangka kerja damai yang berisikan penyerahan senjata serta pemulihan kondisi-kondisi wilayah yang telah menjadi wilayah otonom bangsa Moro.<sup>94</sup>

Pertemuan antara pemerintah Filipina dengan MILF yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus 2013 yang lalu ternyata menimbulkan amarah dari pihak MNLF. MNLF menganggap langkah pemerintah Filipina melakukan perundingan dengan MILF adalah suatu langkah yang salah. MNLF juga merasa dikhianati oleh pemerintah Filipina karena tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut. Situasi tersebut menyebabkan MNLF melakukan penyerangan secara tiba-tiba ke Balai Kota di kota Zamboanga dan mengibarkan bendera MNLF.<sup>95</sup> MNLF melakukan kontak senjata dengan militer Filipina di kota Zamboanga sebagai bentuk dari protes terhadap perundingan yang sedang terjadi di Malaysia. Kejadian ini menimbulkan krisis kemanusiaan di kota Zamboanga, sebab mengharuskan ribuan warga sipil di kota tersebut untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

---

<sup>93</sup> "Manila and Rebel Group Take Step Toward Peace Plan", sebagaimana dimuat dalam <http://www.nytimes.com/2012/10/08/world/asia/manila-and-rebel-group-take-step-toward-peaceplan.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2014.

<sup>94</sup> "Filipina Setujui Perjanjian Damai Dengan Muslim Moro", sebagaimana dimuat dalam <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2014/01/26/15504/filipinasetujui-perjanjian-damai-dengan-muslim-moro.html>, diakses pada 3 Maret 2014.

<sup>95</sup> "Moro Lumpuhkan Filipina selatan", dalam <http://berita.plasa.msn.com/internasional/okezone/pemberontak-moro-lumpuhkan-Filipina-Selatan>, diakses pada tanggal 27 Maret 2014.

Konflik Bangsamoro berjalan terus hingga saat ini walaupun telah ditempuh “*one million ways*” karena komitmen kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik tidak ada. MILF/MNLF bersikukuh untuk bertahan pada posisi dan kemauannya masing-masing. Apabila ada persetujuan yang ditandatangani, tidak lama kemudian dilanggar lagi dan seterusnya”.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Muhammad Nasir Badu selaku peneliti konflik Internasional Universitas Hasanuddin melalui chat Facebook pada tanggal 9 September 2014.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Bangsamoro berawal dari konflik Horizontal, yakni berawal dari adanya imigrasi orang-orang Kristen ke daerah orang-orang Islam di Mindanao bagian Filipina Selatan, kemudian dari peristiwa tersebut dapat dukungan dari pemerintah Filipina yakni dengan adanya pembentukan undang-undang kepemilikan tanah untuk para orang-orang Kristen yang tinggal di tanah orang Islam, akhirnya Islam di tempat tinggalnya sendiri menjadi minoritas karena kedatangan orang Kristen dari utara Filipina, kemudian akibat dari konflik horizontal tersebut melahirkan konflik agama, konflik ekonomi, konflik politik, dan konflik bersenjata.

Konflik horizontal berkembang menjadi konflik vertikal, konflik vertikal yang terjadi yakni adanya undang-undang kepemilikan tanah yang mendapat dukungan dari pemerintah Filipina, mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan separatism yang memisahkan diri dari pemerintah Filipina untuk memperoleh kemerdekaan atas Bangsamoro di Filipina Selatan. Dengan munculnya gerakan separatism menandakan bahwa adanya kebangkitan Islam di Filipina.

- 2) Konflik antara masyarakat Bangsamoro dengan pemerintah Filipina selatan hadir karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Filipina yang tidak sesuai dengan tuntutan Bangsamoro yang hendak memisahkan diri dari bagian wilayah Filipina dengan membentuk Negara baru dan diskriminasi pemerintah Filipina terhadap masyarakat Bangsamoro. Berbagai bentuk gerakan separatisme pun hadir sebagai upaya untuk

mempertahankan apa yang telah menjadi tuntutan dari masyarakat Bangsamoro, seperti halnya gerakan MIM, MNLF, MILF, dll.

Proses penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak yang bertikai adalah dengan mengadakan beberapa pembicaraan yang diprakarsai oleh negara-negara Islam dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), pemerintah Filipina serta perwakilan dari organisasi politik yang mewakili kedua belah pihak yang bertikai dan kemudian pembicaraan ini melahirkan perjanjian atau kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak demi terciptanya kedamaian di Filipina Selatan. Beberapa kesepakatan yang lahir untuk menyelesaikan konflik ini diantaranya; *Tripoli Agreement* yang dilaksanakan pada bulan Desember 1976 di Tripoli, Lybia, *Jeddah Accord* yang ditandatangani pada bulan Januari 1987 oleh Presiden Aquino dan Nur Misuari pemimpin MNLF di Jeddah, Arab Saudi, dan *Peace Agreement* yang ditandatangani oleh Presiden Fidel Ramos dan pihak MNLF, isi perjanjian ini menerima otonomi khusus atas wilayah Muslim di Filipina Selatan, dan perundingan yang terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 di Malaysia. Hasil dari perundingan tersebut membicarakan kerangka kerja damai yang merupakan suatu awal proses menuju persetujuan perdamaian. Pertemuan yang digelar di Malaysia membahas kerangka kerja damai yang berisikan penyerahan senjata serta pemulihan kondisi-kondisi wilayah yang telah menjadi wilayah otonom Bangsamoro. Pertemuan yang terakhir ini menimbulkan amarah dari pihak MNLF. MNLF menganggap langkah pemerintah Filipina melakukan perundingan dengan dengan MNLF adalah suatu langkah yang salah. MNLF juga merasa dikhianati oleh pemerintah Filipina karena tidak dilibatkan dalam perundingan.

## **B. Implikasi**

Konflik Bangsamoro dengan pemerintah Filipina yang telah terjadi puluhan tahun dan memakan ribuan korban jiwa perlu mendapat perhatian lebih bagi dunia internasional dalam meredam konflik yang ada, karena pihak Negara dalam hal ini pemerintah yang seharusnya dapat memberikan perhatian penting dalam menangani konflik yang ada justru menjadi aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

Tulisan ini hadir untuk memaparkan fenomena konflik Bangsamoro dengan pemerintah Filipina yang tidak kunjung usai dengan berbagai macam metode, kesepakatan, perjanjian, dan keikutsertaan pihak ketgia menengahi konflik tersebut telah dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *Peran Pihak Ketiga dalam Resolusi Konflik. Kasus Indonesia dan Libya dalam Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF)*. Jakarta: UI, 2000
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Budiwanti, Erni. *Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai*. Jakarta: LIPI, 2001
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Chaidar, Al. *Wacana Ideologi Negara Islam : Studi Harakah Darul Islam dan MNLF*. Jakarta: Darul Falah, 2003
- Fisher, Simon, dkk. *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council, 2000
- Fitzduff, Mari. *Keterampilan Komunitas dalam Menghadapi Konflik*. Cet III. Jakarta: The British Council, 2002
- Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Joko, Subagyo. *Metode Penelitian*. Cet IV. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Lamijo, dkk, *Demografi dan Sejarah Kolonisasi di Filipina*. Jakarta: LIPI, 2003

- Madale, Nagasura. *The Future of the Moro National Liberation Front (MNLF) As A Separatist Movement in Southren Philippines*. Armed Separatism in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1984
- Mahbub, Djunaedi. *Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan*. Jakarta: PT Al Ma'arif, 1975
- Majul, Cesar. *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainnury. Jakarta: LP3ES, 1989
- Majul, Cesar. *Filipina dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jakarta: Mizan, 2001
- Majul, Cesar. *Muslim in the Philippines*, edisi ke-2. Quezon City: University of the Philippines Press, 1973
- Mangandaralam, Syahbuddin. *Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Masha, Durorudin. *Gerakan Resistensi Minoritas Muslim Filipina, Thailand, dan Myanmar*. Jakarta: LIPI, 2004
- Muhammad Daud, Abu Ibrahim, *The Secret of Jihad Moro Fakta – Fakta Perlawanan Kaum Tertindas Moro*. Solo: Media Islamika, 2008
- Nasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Pangandaralam, Syahbuddin. *Mengenal Dari Dekat Filipina*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Pujiastuti, Tri Nuke. *Problematika Muslim Filipina, Thailand, dan Myanmar*. Jakarta: LIPI, 2003

Rasul Sr, Jainal. *Struggle for Identity: A Short History of The Filipino Muslim*. Quezon City: East Kamias, 2003

Robert McKenna, Thomas. *Muslim Rules and Rebels. Everyday Politics and Armed Separatism in the Southren Philippines*. Manila: Anvil Publishing Inc, 1998

Setiadi, Elly M, dkk. *Pengantar sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1998

Surwandono, dkk. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Surwandono. *Manajemen Konflik Separatisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Cet II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet I. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009

### **Lainnya**

Cagoco-Guiam, Rufa. *Mindanao: Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace*. Dalam buku *Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities*. United States: Lynne Rienner Publisher, inc, 2004

*Digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/208/jiptiain—nurdianahn-10396-2-minorita-pdf*. 2008



*E-book. Riswanto. Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina tahun 1968-1996 (Suatu Kajian Historis).*

Filipina Setujui Perjanjian Damai Dengan Muslim Moro”, sebagaimana dimuat dalam <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2014/01/26/15504/filipinasetujui-perjanjian-damai-dengan-muslim-moro.html>, diakses pada 3 Maret 2014

Journal of Peace Research, vol. 42, No. 5, Sage Publications. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 2005

Manila and Rebel Group Take Step Toward Peace Plan”, sebagaimana dimuat dalam <http://www.nytimes.com/2012/10/08/world/asia/manila-and-rebel-group-take-step-toward-peaceplan.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2014.

*Mejakerusi.wordpress.com/08/21/sejarah-awal-perjuangan-islam-bangsamoro-di-selatan-filipina/2010*

Moro Lumpuhkan Filipina Selatan”, dalam <http://berita.Plasa.msn.Com/international/okezone/pemberontak-moro-lumpuhkan-Filipina-Selatan>, diakses pada tanggal 27 Maret 2014

Perjanjian perdamaian pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menghadapi tantangan hukum dari kelompok pemberontak Moro lain”, sebagaimana dimuat dalam <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-10-10/perjanjian-damai-filipinamilf-hadapi-ancaman/1028140>, diakses pada tanggal 21 Juni 2014

## BIOGRAFI SINGKAT

Reskiyanti. Penulis ini lahir di Bone pada 2 Agustus 1992. Putri ketiga pasangan Almarhum Muh.Zain dan Hj. Hasni, memiliki satu orang kakak laki-laki



dan satu orang kakak perempuan. Masa kanak-kanak ia habiskan di Bone, dan kemudian melanjutkan kehidupannya di Kalimantan Timur.

Pada 2010, Reski melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik. Ia tercatat sebagai keanggotaan Komunitas Desain Grafis dan Fotografi (PIXEL) UIN Alauddin Makassar sejak 2010.

Hobinya sejak remaja adalah berdiskusi, aktif dalam bimbingan belajar olimpiade Ilmu Kebumihan dan Fisika, serta aktif dalam dunia fotografi dan pramuka. Beberapa penghargaan yang pernah ia raih selama masa studinya antara lain: Lolos seleksi Jambore Nasional Pramuka tingkat SMP di Cibubur, PMR tingkat Kabupaten, 8 besar tes Bhs. Inggris tertulis tingkat pelajar SMA se-Indonesia yang diadakan oleh British. Juara 1 Lomba Fotografi tingkat kampus se-Makassar oleh BEM Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar.

Selain hal tersebut, kesibukan lain yang ia jalani semasa kuliah adalah sebagai sekertaris AMIP (Asosiasi Mahasiswi Ilmu Politik) UIN Alauddin Makassar, bendahara umum Korp HMI Wati Komisariat Ushuluddin, Filsafat, dan Politik periode 2012-2013, sebagai ketua pelaksana pembentukan pengurus pusat Himpunan

Pelajar Mahasiswa Kutai Kartanegara se-Indonesia, serta berperan aktif dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Hpmk3t-Makassar) periode 2012-2014.

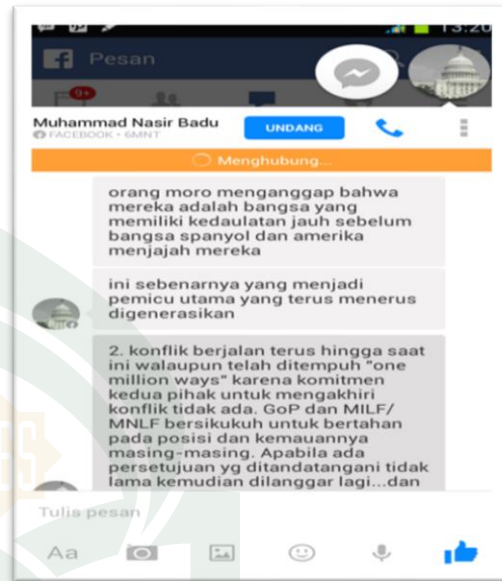


### C. Lampiran

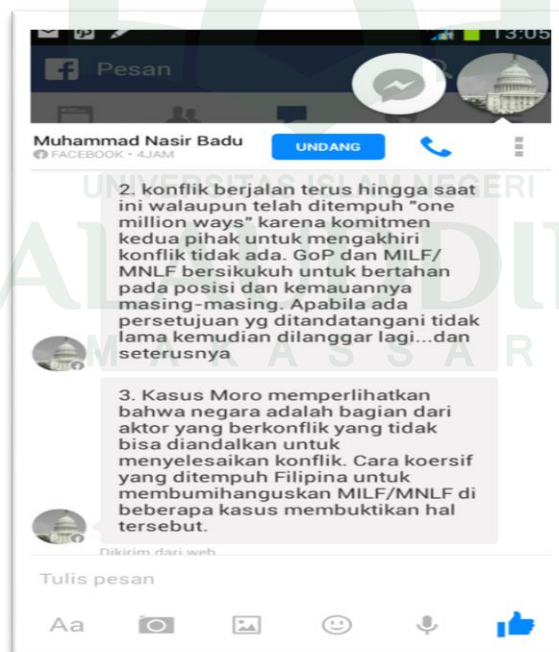
#### Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir Badu selaku akademisi dan peneliti Konflik internasional UNHAS



Wawancara pada tanggal 8 Agustus  
Pukul 13:21



Wawancara pada tanggal 9 Agustus  
Pukul 13:20



Wawancara pada tanggal 9 Agustus  
Pukul 13:05